



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**
JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG

Tahun Anggaran 2021



LAPORAN KEUANGAN

**PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD PROV. JATENG**





**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434
7608435 – 7608533 – 7603586 -7608581

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Selaku

Pengguna Anggaran





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	#DIV/0!	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	#DIV/0!	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	#DIV/0!	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	#DIV/0!	-
8	Pajak Rokok		-	-	#DIV/0!	-
9	Retribusi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	#DIV/0!	-
11	Retribusi Jasa Usaha		-	-	#DIV/0!	-
12	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	#DIV/0!	-
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
16	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
20	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	#DIV/0!	-
21	Jasa Giro		-	-	#DIV/0!	-
22	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	#DIV/0!	-
23	Pendapatan Bunga		-	-	#DIV/0!	-
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
25	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-	#DIV/0!	-
26	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	#DIV/0!	-
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	#DIV/0!	-
28	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
30	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	#DIV/0!	-
31	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	#DIV/0!	-
32	Pendapatan BLUD		-	-	#DIV/0!	-
33	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
34	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	#DIV/0!	-
35	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	#DIV/0!	-
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	#DIV/0!	-
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
38	Pendapatan Zakat		-	-	#DIV/0!	-
39	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksaan		-	-	#DIV/0!	-
40	Pendapatan Lain-Lain SKPKD		-	-	#DIV/0!	-
41	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		-	-	#DIV/0!	-
42						
43	PENDAPATAN TRANSFER					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
45	Dana Perimbangan		-	-	#DIV/0!	-
46	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	#DIV/0!	-
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	#DIV/0!	-
48	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
49	Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
50	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
53	Pendapatan Hibah		-	-	#DIV/0!	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	#DIV/0!	-
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	#DIV/0!	-
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	#DIV/0!	-
59	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
60	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	#DIV/0!	-
62	Lain-lain Pendapatan		-	-	#DIV/0!	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		-	-	#DIV/0!	-
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		10.810.061.000,00	10.670.622.193,00	98,71	15.027.723.231,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		5.397.916.000,00	5.291.684.096,00	98,03	5.777.505.320,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		5.412.145.000,00	5.378.938.097,00	99,39	5.855.393.307,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-	#DIV/0!	3.394.824.604,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	#DIV/0!	-
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
76	Belanja Pegawai BOS		-	-	#DIV/0!	-
77	Belanja Pegawai BLUD		-	-	#DIV/0!	-
78	Belanja Barang dan Jasa		11.193.274.000,00	11.103.925.797,00	99,20	14.522.522.746,00
79	Belanja Barang		3.764.711.000,00	3.757.845.116,00	99,82	1.517.255.700,00
80	Belanja Jasa		4.931.471.000,00	4.863.330.615,00	98,62	2.898.952.060,00
81	Belanja Pemeliharaan		444.906.000,00	435.491.900,00	97,88	402.656.450,00
82	Belanja Perjalanan Dinas		2.052.186.000,00	2.047.258.166,00	99,76	2.221.372.536,00
83	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-	#DIV/0!	7.482.286.000,00
84	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	#DIV/0!	-
85	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	#DIV/0!	-
86	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	#DIV/0!	-
87	Belanja Bunga		-	-	#DIV/0!	-
88	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
92	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	#DIV/0!	-
93	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
94	Belanja Subsidi		-	-	#DIV/0!	-
95	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
96	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
97	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	#DIV/0!	-
98	Belanja Hibah		-	-	#DIV/0!	-
99	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
100	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
101	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
102	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
103	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	#DIV/0!	-
104	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	#DIV/0!	-
105	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	#DIV/0!	-
106	Belanja Bantuan Sosial		9.076.000.000,00	8.956.000.000,00	98,68	-
107	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		9.076.000.000,00	8.956.000.000,00	98,68	-
108	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	#DIV/0!	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	#DIV/0!	-
111	Jumlah Belanja Operasi		31.079.335.000,00	30.730.547.990,00	98,88	29.550.245.977,00
112						
113	BELANJA MODAL					
114	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
115	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		78.100.000,00	78.100.000,00	100,00	451.062.000,00
117	Belanja Modal Alat Besar		-	-	#DIV/0!	-
119	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-	#DIV/0!	-
120	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	#DIV/0!	-
121	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	#DIV/0!	-
122	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		24.100.000,00	24.100.000,00	100,00	144.015.000,00
123	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	140.309.000,00
124	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	#DIV/0!	-
125	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	#DIV/0!	-
126	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-	#DIV/0!	-
127	Belanja Modal Komputer		29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	166.738.000,00
128	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
129	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
130	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	#DIV/0!	-
131	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
132	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	#DIV/0!	-
133	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	#DIV/0!	-
134	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	#DIV/0!	-
135	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	#DIV/0!	-
136	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
137	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	#DIV/0!	-
138	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	#DIV/0!	-
139	Belanja Modal Gedung		-	-	#DIV/0!	-
140	Belanja Modal Monumen		-	-	#DIV/0!	-
141	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	#DIV/0!	-
142	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	#DIV/0!	-
143	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	#DIV/0!	-
144	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	#DIV/0!	-
145	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	#DIV/0!	-
146	Belanja Modal Instalasi		-	-	#DIV/0!	-
147	Belanja Modal Jaringan		-	-	#DIV/0!	-
148	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		500.000,00	176.500,00	35,30	504.981.410,00
149	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		500.000,00	176.500,00	35,30	22.754.500,00
150	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
151	Belanja Modal Hewan		-	-	#DIV/0!	-
152	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	#DIV/0!	-
153	Belanja Modal Tanaman		-	-	#DIV/0!	-
154	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	#DIV/0!	-
155	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	#DIV/0!	482.226.910,00
156	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	#DIV/0!	-
157	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
158	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	#DIV/0!	-
159	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain		78.600.000,00	78.276.500,00	99,59	956.043.410,00
160	Jumlah Belanja Modal					
161						
162	BELANJA TAK TERDUGA		-	-	#DIV/0!	-
163	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
164	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
165	Jumlah Belanja Tidak Terduga					
166						
167	BELANJA TRANSFER		-	-	#DIV/0!	-
168	Belanja Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	#DIV/0!	-
170	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
171	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
172	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
173	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
174	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
175	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	#DIV/0!	-
176	Jumlah Belanja Transfer					
177			31.157.935.000,00	30.808.824.490,00	98,88	30.506.289.387,00
178	JUMLAH BELANJA DAERAH					
179			(31.157.935.000,00)	(30.808.824.490,00)	98,88	(30.506.289.387,00)
180	SURPLUS/DEFISIT					
181						
182	PEMI PEMBIAYAAN DAERAH					
183	PEI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		-	-	#DIV/0!	-
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	#DIV/0!	-
185	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	#DIV/0!	-
186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
187	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
188	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
189	Penghematan Belanja		-	-	#DIV/0!	-
190	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		-	-	#DIV/0!	-
191	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
192	Sisa Belanja Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
193	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
194	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
196	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
197	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
199	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
200	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
201	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
202	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
203	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
205	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
206	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
207	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
208	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
209	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
210	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
211	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		-	-	#DIV/0!	-
213	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
214	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
215						
216	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
218	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-	#DIV/0!	-
220	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
221	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	#DIV/0!	-
223	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
224	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
225	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
226	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
227	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
229	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
230	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
231	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
232	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
233	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
234	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
235	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		-	-	#DIV/0!	-
237	Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
238	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
239						
240	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	#DIV/0!	-
241						
242	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(31.157.935.000,00)	(30.808.824.490,00)	-	(30.506.289.387,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





NERACA KOMPARATIF
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2021	2020
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	-
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Investasi Jangka Pendek		-	-
13	Investasi dalam Saham		-	-
14	Investasi dalam Deposito		-	-
15	Investasi dalam SUN		-	-
16	Investasi dalam SBI		-	-
17	Investasi dalam SPN		-	-
18	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
19	Piutang Pajak Daerah		-	-
20	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
21	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
22	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
23	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
24	Piutang Pajak Rokok		-	-
36	Piutang Retribusi Daerah		-	-
37	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
38	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
39	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
40	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisihkan		-	-
41	Piutang Bagian Laba atas Penerimaan Modal pada BUMN		-	-
42	Piutang Bagian Laba atas Penerimaan Modal pada BUMD		-	-
43	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah		-	-
44	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
45	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Disisihkan		-	-
46	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak		-	-
47	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Disisihkan		-	-
48	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
49	Piutang Jasa Giro		-	-
50	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Berakumulasi		-	-
51	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
52	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan		-	-
53	Piutang Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain		-	-
54	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah		-	-
55	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan		-	-
56	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
57	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
58	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
59	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
60	Piutang Pendapatan BLUD		-	-
61	Piutang Pendapatan Denda pemanfaatan BMD yang Tidak		-	-
62	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional		-	-
63	(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
64	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Berakumulasi		-	-
65	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
66	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
67	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
68	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
69	Piutang Dana Perimbangan		-	-
70	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
71	Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		-	-
72	Piutang Dana Keistimewaan		-	-
73	Piutang Dana Desa		-	-
74	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
75	Piutang Bagi Hasil		-	-
76	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
77	Piutang Lainnya		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
79	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
80	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
81	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
82	Uang Muka		-	-
83	Penyisihan Piutang		-	-
84	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
85	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
86	Beban Dibayar Dimuka		99.822.372.06	87.650.507.38
87	Beban Dibayar Dimuka		99.822.372.06	87.650.507.38
88	Persediaan		776.500.00	750.000.00
89	Barang Pakai Habis		776.500.00	750.000.00
90	Barang Tak Habis Pakai		-	-
91	Barang Bekas Dipakai		-	-
92	JUMLAH ASET LANCAR		100.598.872.06	88.400.507.38
93	INVESTASI JANGKA PANJANG			
94	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
95	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
96	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
97	Investasi dalam Obligasi		-	-
98	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
99	Dana Berakumulasi		-	-
100	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
101	Penerimaan Modal		-	-
102	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
103	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
104				

105	ASET TETAP			
106	Tanah		17.413.941.740.00	17.413.941.740.00
107	Tanah		17.413.941.740.00	17.413.941.740.00
108	Peralatan dan Mesin		10.091.604.117.00	9.913.679.117.00
109	Alat Besar		526.280.900.00	526.280.900.00
110	Alat Anakutan		4.156.418.720.00	4.156.418.720.00
111	Alat Benakel dan Alat Ukur		-	-
112	Alat Pertanian		-	-
113	Alat Kantor dan Rumah Tanaga		3.126.866.512.00	3.077.766.512.00
114	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		600.255.496.00	600.255.496.00
115	Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-
116	Alat Laboratorium		-	-
117	Alat Persenlataan		-	-
118	Komputer		1.571.857.489.00	1.542.857.489.00
119	Alat Eksplorasi		-	-
120	Alat Pengeboran		-	-
121	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
122	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
123	Alat Keselamatan Keria		-	-
124	Alat Peraga		99.825.000.00	-
125	Peralatan Proses/Produksi		-	-
126	Rambu-rambu		-	-
127	Peralatan Olahraga		10.100.000.00	10.100.000.00
128	Geduna dan Bangunan		10.620.119.060.00	10.620.119.060.00
129	Bangunan Gedung		10.620.119.060.00	10.620.119.060.00
130	Monumen		-	-
131	Bangunan Menara		-	-
132	Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-
133	Jalan, Iriqasi, dan Jarinaan		-	-
134	Jalan dan Jembatan		-	-
135	Bangunan Air		-	-
136	Instalasi		-	-
137	Jarinaan		-	-
138	Aset Tetap Lainnva		147.230.400.00	147.053.900.00
139	Bahan Perdstakaan		147.060.400.00	146.883.900.00
140	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		170.000.00	170.000.00
141	Hewan		-	-
142	Biota Perairan		-	-
143	Tanaman		-	-
144	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
145	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
146	Konstruksi dalam Pengeriaan		749.565.400.00	749.565.400.00
147	Konstruksi dalam Pengeriaan		749.565.400.00	749.565.400.00
148	Akumulasi Penvusutan		(12.199.434.938.64)	(11.488.329.859.83)
149	Akumulasi Penvusutan Peralatan dan Mesin		(9.084.519.404.44)	(8.585.244.242.00)
150	Akumulasi Penvusutan Gedung dan Bangunan		(3.114.915.534.20)	(2.903.085.617.83)
151	Akumulasi Penvusutan Jalan, Jarinaan, dan Iriqasi		-	-
152	Akumulasi Penvusutan Aset Tetap Lainnva		-	-
153	JUMLAH ASET TETAP		26.823.025.778.36	27.356.029.357.17
154				
155	DANA CADANGAN			
156	Dana Cadangan		-	-
157	Dana Cadangan		-	-
158	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
159				
160	ASET LAINNYA			
161	Tadiah Janaka Paniana		-	-
162	Tadiah Penjualan Anasuran		-	-
163	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
164	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
165	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
166	Aset Tak Berwuiud		578.387.600.00	-
167	Aset Tak Berwuiud		578.387.600.00	-
168	Aset Lain-lain		-	-
169	Aset Lain-Lain		-	-
170	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwuiud		(231.474.840.00)	-
171	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwuiud		(231.474.840.00)	-
172	Akumulasi Penvusutan Aset Lainnva		-	-
173	Akumulasi Penvusutan Aset Lainnva		-	-
174	JUMLAH ASET LAINNYA		346.912.760.00	-
175				
176	JUMLAH ASET		27.270.537.410.42	27.444.429.864.55
177				
178	KEWAJIBAN			
179	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
180	Utana Perhitunaan Pihak Ketiga		-	-
181	Utana Tasoen		-	-
182	Utana Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
183	Utana Iuran Jaminan Kecelakaan Keria		-	-
184	Utana Iuran Jaminan Kematian		-	-
185	Utana PPh Pusat		-	-
186	Utana PPN Pusat		-	-
187	Utana Taperum		-	-
188	Utana Iuran Wajib Pegawai		-	-
189	Utana Pihak Ketiga Lainnva		-	-
190	Utana Bunaa		-	-
191	Utana Bunaa kepada Pemerintah Pusat		-	-
192	Utana Bunaa kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
193	Utana Bunaa kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
194	Utana Bunaa kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
195	Utana Bunaa kepada Masyarakat		-	-
196	Utana Bunaa BLUD		-	-
197	Utana Piniaman Janaka Pendek		-	-
198	Utana Piniaman dari Pemerintah Daerah		-	-
199	Utana Piniaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
200	Utana Piniaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
201	Utana Piniaman BLUD		-	-
202	Badian Lancar Utana Janaka Paniana		-	-
203	Badian Lancar Utana Janaka Paniana dari Pemerintah Pusat		-	-
204	Badian Lancar Utana Janaka Paniana kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
205	Badian Lancar Utana Janaka Paniana kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)		-	-
206	Badian Lancar Utana Janaka Paniana dari Masyarakat		-	-
207	Badian Lancar Utana Janaka Pendek BLUD		-	-
208	Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnva		-	-
209	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		-	-
210	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	-
211	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-

212	Utano Belania	-	-
213	Utano Belania Pegawai	-	-
214	Utano Belania Barana dan Jasa	-	-
215	Utano Belania Bunga	-	-
216	Utano Belania Subsidi	-	-
217	Utano Belania Hibah	-	-
218	Utano Belania Modal Tanah	-	-
219	Utano Belania Modal Peralatan dan Mesin	-	-
220	Utano Belania Modal Gedung dan Bangunan	-	-
221	Utano Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
222	Utano Belania Aset Tetap Lainnya	-	-
223	Utano Belania Tidak Terduaa	-	-
224	Utano Belania Baai Hasil	-	-
225	Utano Belania Bantuan Keuangan	-	-
226	Utano Jangka Pendek Lainnya	-	-
227	Utano Kelebihan Pembavaran PAD	-	-
228	Utano Kelebihan Pembavaran Transfer	-	-
229	Utano Kelebihan Pembavaran Lain-Lain Pendapatan Daerah vana Sah	-	-
230	Utano Transfer	-	-
231	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
232		-	-
233	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
234	Utano kepada Pemerintah Pusat	-	-
235	Utano atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	-	-
236	Utano atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	-	-
237	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundana-Undanaa	-	-
238	Utano kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
239	Utano kepada LKB-BUMN	-	-
240	Utano kepada LKB-BUMD	-	-
241	Utano kepada LKB-Swasta	-	-
242	Utano kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-
243	Utano kepada LKBB-BUMN	-	-
244	Utano kepada LKBB-BUMD	-	-
245	Utano kepada LKBB-Swasta	-	-
246	Utano kepada Masvarakat	-	-
247	Obligasi	-	-
248	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
249		-	-
250	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
251		-	-
252	EKUITAS	-	-
272	EKUITAS	(34.044.576.466,58)	(3.061.859.522,44)
273	Ekuitas	27.321.197.278,71	27.237.051.145,39
274	Surplus/Defisit-LQ	(61.365.773.745,29)	(30.298.910.667,83)
275	Ekuitas SAL	-	-
276	Estimasi Pندانatan	-	-
277	Estimasi Penerimaan Pembiavaan	-	-
278	Anropriasi Belania	-	-
279	Anropriasi Pengeluaran Pembiavaan	-	-
280	Estimasi Perubahan SAL	-	-
281	Surplus/Defisit-L RA	-	-
282	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	61.315.113.877,00	30.506.289.387,00
283	RK PPKD	61.315.113.877,00	30.506.289.387,00
284	JUMLAH EKUITAS	27.270.537.410,42	27.444.429.864,55
285		-	-
286	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	27.270.537.410,42	27.444.429.864,55

* Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DISPERANIN
(M. H. DJATMIKO, MA.)
NIP. 19660801 199603 1 004



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021	2020	Kesalahan/(Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
7	Pajak Air Permukaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	#DIV/0!
9	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
10	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-	#DIV/0!
11	Retribusi Jasa Usaha - LO		-	-	-	#DIV/0!
12	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	#DIV/0!
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	#DIV/0!
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	#DIV/0!
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-		#DIV/0!
16	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
18	Hasil Seisih Lemin Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
20	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
21	Jasa Giro - LO		-	-	-	#DIV/0!
22	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	#DIV/0!
23	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	#DIV/0!
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
25	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		-	-	-	#DIV/0!
26	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	#DIV/0!
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
28	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
30	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	#DIV/0!
31	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-	#DIV/0!
32	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	#DIV/0!
33	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
34	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	#DIV/0!
35	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	#DIV/0!
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	#DIV/0!
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
38	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	#DIV/0!
39	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa - LO		-	-	-	#DIV/0!
40	Pendapatan Lain-Lain SKPKD - LO		-	-	-	#DIV/0!
41	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
42						
43	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	#DIV/0!
45	Dana Perimbangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
46	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-	#DIV/0!
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-	#DIV/0!
48	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-	#DIV/0!
49	Bantuan Keuangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
50	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	#DIV/0!
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
53	Pendapatan Hibah- LO		-	-	-	#DIV/0!
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	#DIV/0!
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-	#DIV/0!
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO		-	-	-	#DIV/0!
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO		-	-	-	#DIV/0!
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO		-	-	-	#DIV/0!
59	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
60	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
62	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-	#DIV/0!
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH -LO		-	-	-	#DIV/0!
66						

67	BEBAN					
68	BEBAN OPERASIONAL					
69	Beban Pegawai	10.670.622.193,00	15.027.723.231,00	(4.357.101.038)	(28,99)	
70	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.291.684.096,00	5.777.505.320,00	(485.821.224)	(8,41)	
71	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.378.938.097,00	5.855.393.307,00	(476.455.210)	(8,14)	
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	3.394.824.604,00	(3.394.824.604)	(100,00)	
73	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	#DIV/0!	
74	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	#DIV/0!	
75	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	#DIV/0!	
76	Beban Pegawai BOS	-	-	-	#DIV/0!	
77	Beban Barang dan Jasa	19.661.158.832,32	7.018.695.243,95	12.642.463.588	180,13	
78	Beban Barang	3.657.993.616,00	1.385.849.100,00	2.272.144.516	163,95	
79	Beban Jasa	4.564.415.150,32	3.008.817.157,95	1.555.597.992	51,70	
80	Beban Pemeliharaan	435.491.900,00	402.656.450,00	32.835.450	8,15	
81	Beban Perjalanan Dinas	2.047.258.166,00	2.221.372.536,00	(174.114.370)	(7,84)	
82	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.956.000.000,00	-	8.956.000.000	#DIV/0!	
83	Beban Barang dan Jasa BOP	-	-	-	#DIV/0!	
84	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	#DIV/0!	
85	Beban Bunga	-	-	-	#DIV/0!	
86	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	#DIV/0!	
87	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	#DIV/0!	
88	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	#DIV/0!	
89	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	-	#DIV/0!	
90	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	-	-	-	#DIV/0!	
91	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD	-	-	-	#DIV/0!	
92	Beban Subsidi	-	-	-	#DIV/0!	
93	Beban Subsidi kepada BUMN	-	-	-	#DIV/0!	
94	Beban Subsidi kepada BUMD	-	-	-	#DIV/0!	
95	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	#DIV/0!	
	Beban Subsidi kepada Koperasi	-	-	-	#DIV/0!	
96	Beban Hibah	-	-	-	#DIV/0!	
97	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	#DIV/0!	
98	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	#DIV/0!	
99	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	#DIV/0!	
100	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	#DIV/0!	
101	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	#DIV/0!	
102	Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	#DIV/0!	
103	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	#DIV/0!	
104	Beban Bantuan Sosial	-	7.482.286.000,00	(7.482.286.000)	(100,00)	
105	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	#DIV/0!	
106	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	#DIV/0!	
107	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	7.482.286.000,00	(7.482.286.000)	(100,00)	
108	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	#DIV/0!	
109	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!	
110	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	#DIV/0!	
111	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	#DIV/0!	
112	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisihkan	-	-	-	#DIV/0!	
113	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	#DIV/0!	
114	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	#DIV/0!	
115	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	-	-	-	#DIV/0!	
116	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	#DIV/0!	
	Beban Lain-Lain	-	30.000.000,00	(30.000.000)	(100,00)	
	Beban Lain-Lain	-	30.000.000,00	(30.000.000)	(100,00)	
117	Jumlah Beban Operasional	30.331.781.025,32	29.558.704.474,95	773.076.550	2,62	
118						
119	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
120	Beban Peralatan dan Mesin	499.275.162,44	541.183.016,50	(41.907.854)	(7,74)	
121	Beban Alat Besar	65.785.112,50	65.785.112,50	-	-	
123	Beban Alat Angkutan	112.019.750,00	135.072.250,00	(23.052.500)	(17,07)	
124	Beban Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	#DIV/0!	
125	Beban Alat Pertanian	-	-	-	#DIV/0!	
126	Beban Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.719.066,65	153.401.504,00	(4.682.437)	(3,05)	
127	Beban Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.613.400,00	33.613.400,00	-	-	
128	Beban Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	#DIV/0!	
129	Beban Alat Laboratorium	-	-	-	#DIV/0!	
	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	#DIV/0!	
130	Beban Komputer	134.949.083,33	150.785.750,00	(15.836.667)	(10,50)	
131	Beban Alat Eksplorasi	-	-	-	#DIV/0!	
132	Beban Alat Pengeboran	-	-	-	#DIV/0!	
133	Beban Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	#DIV/0!	
134	Beban Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	#DIV/0!	
135	Beban Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	#DIV/0!	
136	Beban Alat Peraga	1.663.749,96	-	1.663.750	#DIV/0!	
137	Beban Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	#DIV/0!	
138	Beban Rambu-rambu	-	-	-	#DIV/0!	
139	Beban Peralatan Olahraga	2.525.000,00	2.525.000,00	-	-	
140	Beban Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	#DIV/0!	
141	Beban Gedung dan Bangunan	211.829.916,37	211.829.916,38	(0)	(0,00)	
142	Beban Gedung	211.829.916,37	211.829.916,38	(0)	(0,00)	

143	Beban Monumen			-	-	-	#DIV/0!
144	Beban Bangunan Menara			-	-	-	#DIV/0!
145	Beban Tugu Titik Kontrol/Pasti			-	-	-	#DIV/0!
146	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	-	-	#DIV/0!
147	Beban Jalan dan Jembatan			-	-	-	#DIV/0!
148	Beban Bangunan Air			-	-	-	#DIV/0!
149	Beban Instalasi			-	-	-	#DIV/0!
150	Beban Jaringan			-	-	-	#DIV/0!
151	Beban Aset Tetap Lainnya			-	-	-	#DIV/0!
152	Beban Bahan Perpustakaan			-	-	-	#DIV/0!
153	Beban Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga			-	-	-	#DIV/0!
154	Beban Hewan			-	-	-	#DIV/0!
155	Beban Biota Perairan			-	-	-	#DIV/0!
156	Beban Tanaman			-	-	-	#DIV/0!
157	Beban Barang Koleksi Non Budaya			-	-	-	#DIV/0!
158	Beban Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-	#DIV/0!
159	Beban Aset Tetap Lainnya BOS			-	-	-	#DIV/0!
160	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-	#DIV/0!
161	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-	#DIV/0!
162	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		23.976.973,33	-	-	23.976.973	#DIV/0!
163	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		23.976.973,33	-	-	23.976.973	#DIV/0!
164	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		735.082.052,14	753.012.932,88	2.283.367.889,63	303,23	
165							
166	BEBAN TRANSFER						
167	Beban Bagi Hasil		-	-	-	-	#DIV/0!
168	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-	#DIV/0!
169	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-	#DIV/0!
170	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	-	#DIV/0!
171	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	#DIV/0!
172	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	-	#DIV/0!
173	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-	#DIV/0!
174	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	-	-	#DIV/0!
175	Jumlah Beban Transfer		-	-	-	-	#DIV/0!
176							
177	JUMLAH BEBAN		31.066.863.077,46	30.311.717.407,83	755.145.669,63	2,49	
178							
179	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL		(31.066.863.077,46)	(30.311.717.407,83)	(755.145.669,63)	2,49	
180							
181	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL						
182	SURPLUS NON OPERASIONAL						
183	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
184	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
185	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
186	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO		-	-	-	-	#DIV/0!
187	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
188	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
189	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
190	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
191	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
192	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	12.806.740,00			
193	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	12.806.740,00			
194	Jumlah Surplus Non Operasional		-	12.806.740,00	-	-	
195							
196	DEFISIT NON OPERASIONAL						
197	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
198	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO		-	-	-	-	#DIV/0!
199	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
200	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
201	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
202	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
203	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
204	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO		-	-	-	-	#DIV/0!
205	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-			
206	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-			
207	Jumlah Defisit Non Operasional		-	-	-	-	#DIV/0!
208							
209	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	12.806.740,00	-	-	
210							
211	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(31.066.863.077,46)	(30.298.910.667,83)	(755.145.669,63)	2,49	
212							
213	POS LUAR BIASA						
214	PENDAPATAN LUAR BIASA						
215	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-	#DIV/0!
216	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-	#DIV/0!
217	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA		-	-	-	-	#DIV/0!
218							

219	BEBAN TAK TERDUGA					
220	Beban Tak Terduga		-	-	-	#DIV/0!
221	Beban Tak Terduga			-	-	#DIV/0!
222	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		-	-	-	#DIV/0!
223						
224	JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-	-	#DIV/0!
225						
226	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL		(31.066.863.077,46)	(30.298.910.667,83)	(755.145.669,63)	2,49

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	Ekuitas Awal	27.444.429.864,56	26.609.520.885,39
2	Surplus/Defisit-LO	(31.066.863.077,46)	(30.298.910.667,83)
3	RK PPKD	30.808.824.490,00	30.506.289.387,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	84.146.133,32	627.530.260,00
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	640.337.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		640.337.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	(12.806.740,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		(12.806.740,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	84.146.133,33	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	291.644.000,00	
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	(207.497.866,67)	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi		
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		

4.13	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai		-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa		-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.15	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	(0,01)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	(0,01)	
5	Ekuitas Akhir	27.270.537.410,42	27.444.429.864,56

Ekuitas Neraca	27.270.537.410,42	27.444.429.864,56
Difference	0,00	0,00

DAFTAR ISI

I.	Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran	
II.	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	
III.	Neraca Komporatif SKPD	
IV.	Laporan Operasional SKPD	
V.	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	
VI.	Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1.	Pendahuluan.	
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
Bab 2.	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	
	2.1 Ekonomi Makro.....	3
	2.2 Kebijakan Keuangan.....	4
Bab 3.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
	Secara Umum.....	6
	3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian	
	Target yang Telah Ditetapkan.....	7
Bab 4.	Kebijakan Akuntansi	
	4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan	
	Daerah SKPD.....	10
	4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan	
	Laporan Keuangan SKPD.....	10
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan	
	Keungan SKPD.....	10
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan	
	Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD.....	16
Bab 5.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
	5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
	5.1.1 Pendapatan.....	17
	5.1.2 Belanja	19
	5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	
	5.2.1 Aset.....	38
	5.2.2 Kewajiban.....	43
	5.2.3 Ekuitas.....	43

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan..... 44

5.3.2 Beban..... 44

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas..... 49

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan..... 51

Bab 7. Penutup..... 61

Lampiran Tambahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/0015873 tanggal 11 November 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2021 sebelum perubahan dan Perubahan tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 41.803.852.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.531.307.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 27.272.545.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan. Kemudian ketika realisasi anggaran berjalan, saat perubahan anggaran terjadi pengurangan di sektor belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp. 10.810.061.000,- , dan secara rinci terjadi Penambahan (+) dan Pengurangan (-) pada Rekening :

1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (-),
2. Tunjangan Keluarga (-),
3. Tunjangan Jabatan (-),
4. Tunjangan Fungsional Umum (-),
5. Tunjangan Beras (-),
6. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus (-),
7. Pembulatan Gaji (-),
8. Iuran BPJS Kesehatan (-),
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian (-),
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (-),
11. Iuran Jaminan Kematian (-),
12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (-).

sedangkan belanja langsung terjadi pengurangan Anggaran menjadi sebesar Rp. 20.347.874.000,- Pada Semua Program Baik Program Pendukung maupun Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Perumahan.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
4. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Secara keseluruhan setelah Perubahan Anggaran belanja berkurang sebesar Rp. 10.645.917.000,- atau 25% yang berkurang pada belanja tidak langsung dan belanja langsung perubahan anggaran yang digunakan untuk semua kegiatan bersifat rutin dan pembangunan sebanyak 13 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratraktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA serta DPA Perubahan. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
3. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

5. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja setelah perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 31.157.935.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 31.079.335.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebesar Rp. 78.600.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi digunakan untuk Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dan Honorarium Non PNS dengan Anggaran sebesar Rp. 31.079.335.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.730.547.990,- dengan Presentasi 98,88 % terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 10.810.061.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 10.670.622.193,- dengan Presentasi 98,71 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 139.438.807,-. Sisa anggaran tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun sebanyak 5 orang dan pegawai yang meninggal sebanyak 4 orang.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakayat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 78.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.276.500,- yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 78.100.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 78.100.000,- dengan Presentasi 100 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 500.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 176.500,- dengan Presentasi 35,3 %.

Secara umum pencapaian target fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 35,3 % yang berarti terdapat sisa anggaran sebesar 64,7 % pada Belanja Modal Bahan Perpustakaan yang disebabkan karena kondisi saat ini sementara kebutuhan sudah terpenuhi dan efisiensi dalam pembelian bahan bacaan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD									
TAHUN ANGGARAN 2021									
SKPD	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Fungsi	:								
Sub Fungsi	:								
Provinsi	:	Jawa Tengah							
NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN				JUMLAH	REALISASI ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
					ANGGARAN		Fisik (%)	Keu (%)	
					(Rp.)	(Rp.)			
1	2				3	4	5		6
	BELANJA DAERAH				31.157.935.000	30.808.824.490	100,00	98,88	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				14.518.567.000	14.298.745.131	100,00	98,49	
		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			483.312.000	480.109.500	100,00	99,34	
		Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			141.773.000	141.414.000	100,00	99,75	
		Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Program Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan.			28.950.000	28.840.000	100,00	99,62	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.			216.964.000	216.469.000	100,00	99,77	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			85.385.000	83.146.500	100,00	97,38	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.240.000	10.240.000	100,00	100,00	
		Kegiatan Administrasi Keuangan			10.846.576.000	10.706.735.693	100,00	98,71	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.			10.810.061.000	10.670.622.193	100,00	98,71	
		Sub Kegiatan Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan			8.740.000	8.732.500	100,00	99,91	
		Sub Kegiatan Laporan Keuangan Bulan / Semesteran			23.775.000	23.672.000	100,00	99,57	
				Sub Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.000.000	3.709.000	100,00	92,73	Tidak terserapnya Sub Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi
		Kegiatan Umum			3.146.739.000	3.070.556.895	100,00	97,58	
		Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat			40.650.000	40.650.000	100,00	100,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	406.000.000	378.747.855	100,00	93,29	Tidak terserapnya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dikarenakan dengan kesesuaian tagihan bulanan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000	137.330.000	100,00	98,09	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	921.805.000	888.605.000	100,00	96,40	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	259.971.000	259.961.810	100,00	100,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.010.000	64.966.000	100,00	99,93	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	35.000.000	34.841.250	100,00	99,55	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	23.000.000	22.980.000	100,00	99,91	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.000.000	73.818.100	100,00	99,75	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	95.820.000	94.081.500	100,00	98,19	
				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000	79.950.000	100,00	99,94	
				Sub KegiatanRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	412.240.000	410.800.030	100,00	99,65	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	24.100.000	24.100.000	100,00	100,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	140.480.000	140.282.000	100,00	99,86	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	300.283.000	291.093.350	100,00	96,94	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	78.270.000	78.270.000	100,00	100,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	44.830.000	44.830.000	100,00	100,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	5.280.000	5.250.000	100,00	99,43	
				Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.940.000	41.343.043	100,00	98,58	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	41.940.000	41.343.043	100,00	98,58	
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				11.474.465.000	11.347.803.000	100,00	98,90	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			369.626.000	368.509.000	100,00	99,70	
				Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	14.033.000	13.297.000	100,00	94,76	Karena kondisi pandemi Covid-19 jumlah peserta rapat dibatasi dan kabupaten/kota masih diberlakukan PPKM sehingga sebagian peserta rapat mengikutinya via Zoom Meeting.
				Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	355.593.000	355.212.000	100,00	99,89	
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			159.890.000	157.717.500	100,00	98,64	
				Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	159.890.000	157.717.500	100,00	98,64	
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			3.164.754.000	3.043.646.200	100,00	96,17	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.911.672.000	1.791.033.300	100,00	93,69	Terdapat 10 BNBA Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Pekalongan yg telah mendapatkan bantuan dari Kementrian dan Kabupaten.
				Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.212.884.000	1.212.867.500	100,00	100,00	
				Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	40.198.000	39.745.400	100,00	98,87	
		Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			7.780.195.000	7.777.930.300	100,00	99,97	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	7.780.195.000	7.777.930.300	100,00	99,97	

III.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.042.381.000	3.042.140.989	100,00	99,99	
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.042.381.000	3.042.140.989	100,00	99,99	
	Sub KegiatanPerencanaan Penyediaan PSU Permukiman	133.350.000	133.348.440	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.790.481.000	2.790.381.609	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	118.550.000	118.410.940	100,00	99,88	
IV.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	343.336.000	343.336.000	100,00	100,00	
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	343.336.000	343.336.000	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencanaan Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	343.336.000	343.336.000	100,00	100,00	
V.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	276.154.000	276.154.000	100,00	100,00	
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	276.154.000	276.154.000	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	263.704.000	263.704.000	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12.450.000	12.450.000	100,00	100,00	
VI.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	249.360.000	249.360.000	100,00	100,00	
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	249.360.000	249.360.000	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	107.992.000	107.992.000	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan SinkronisasiPenataan Akses dalam Pemanfaatn Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota	130.568.000	130.568.000	100,00	100,00	
VII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.253.672.000	1.251.285.370	100,00	99,81	
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.253.672.000	1.251.285.370	100,00	99,81	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	1.253.672.000	1.251.285.370	100,00	99,81	
	JUMLAH	31.157.935.000	30.808.824.490	100,00	98,88	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

Tujuan Kebijakan Akutansi adalah mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akutansi. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Yang dimaksud pengguna adalah masyarakat, legislative, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman Pemerintah.

4.1. ENTITAS AKUTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akutansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda, sedangkan entitas Akutansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akutansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akutansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. BASIS AKUTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akutansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca (*basis cash forward to accrual*).

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca.

4.3.4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.5. Piutang

- Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Kemudian di jurnal balik pada awal berikutnya, dan pada saat realisasi penerimaan pendapatan diakui sebagai pendapatan.

4.3.6. Persediaan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investasi fisik (*stock opname*).
- Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian yang terakhir.

4.3.7. Aset Tetap

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud memenuhi kriteria :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Kegiatan Pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal.
- d. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- e. Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap (pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- f. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak pemilikan aset tersebut.
- g. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- h. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.

4.3.8. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sama dengan digunakan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

4.3.9. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya.

Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya. Mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

4.3.10. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

4.3.12. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi, perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

4.3.13. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan dan apabila telah selesai dibangun dan diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

4.3.14. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan.

Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Kemitraan dengan pihak ketiga;
- Aset lain-lain.

4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

4.3.16. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.17. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dan investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode

4.3.18. Koreksi Kesalahan

- Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait;

- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- h. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan keuangan.

4.3.19. Pendapatan

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

4.3.20. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawab atas pengeluaran tersebut.

4.3.21. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA.
- b. Akutansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- c. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- e. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto;
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH

Kebijakan akutansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggl 28 Desember 2017. Pengakuan, pengukuran, pengajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standart Akutansi Pemerintah dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021. Anggaran dan realisasi APBD TA 2021 adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Asli daerah					
2 Pendapatan Transfer					
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah					
Jumlah					

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Pajak Daerah					
2 Pendapatan Retribusi Daerah					
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
Jumlah					

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah Rp,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau %. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum				
2	Retribusi Jasa Usaha				
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	Jumlah				

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan				
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
4	Retribusi Pengolahan Limbah Cair				
5	Retribusi Tera/Tera Ulang				
6	Retribusi Pelayanan Pendidikan				
	Jumlah				

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
2	Retribusi Tempat Pelelangan				
3	Retribusi Terminal				
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila				
5	Retribusi Rumah Potong Hewan				
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
8	Retribusi Penyeberangan di Air				
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
	Jumlah				

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami kenaikan/penurunan* sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					
2 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					
3 Retribusi Izin Usaha Perikanan					
4 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas					
5 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)					
Jumlah					

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp 30.808.824.490,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp, 31.157.935.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 30.808.824.490,00 atau 98.88 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,30.506.289.387,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp, 302.535.103,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Operasi	31.079.335.000,00	30.730.547.990,00	98.88	29.550.245.997,00	1.180.301.993,00
2 Belanja Modal	78.600.000,00	78.276.500,00	99.59	956.043.410,00	(877.766.910,00)
3 Belanja Tidak Terduga					
4 Belanja Transfer					
Jumlah	31.157.935.000,00	30.808.824.490,00	98.88	30.506.289.387,00	302.535.103,00

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp 30.331.781.025,32

Belanja Operasional dengan realisasi sebesar Rp,30.331.781.025,32, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 29.558.704.474,95 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp, 773.076.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	10.670.622.193,00	15.027.723.231,00	(4.357.101.038)
Belanja Barang dan Jasa	19.661.158.832,32	7.018.695.243,95	12.642.463.588
Belanja Bunga			
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah			
Belanja Bantuan Sosial	0	7.482.286.000,00	(7.482.286.000.00)
Jumlah	30.331.781.025,32	29.558.704.474,95	773.076.550

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp 10.670.622.193,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp, 10.810.061.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 10.670.622.193,00 atau 98.71 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 15.027.723.231,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.397.916.000,00	5.291.684.096,00	98.03	5.777.505.320,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.412.145.000,00	5.378.938.097,00	99.39	5.855.393.307,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	3.339.824.604,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
7	Belanja Pegawai BOS				
8	Belanja Pegawai BLUD				
	Jumlah	10.810.061.000,00	10.670.622.193,00	98.71	15.027.723.231,00

Belanja Pegawai tidak mencapai target* dikarenakan : -

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.291.684.096,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp, 5.379.916.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 5.291.684.096,00 atau 98.03 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 5.777.505.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.988.040.000,00	3.921.903.900,00	98.34	4.311.271.700,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	409.234.000,00	401.233.128,00	98.04	440.592.074,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	213.980.000,00	210.020.000,00	98.15	227.990.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.800.000,00	9.800.000,00	100	0
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	138.880.000,00	135.900.000,00	98.85	158.595.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	224.840.000,00	219.215.340,00	97.50	208.786.860,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.488.000,00	219.215.340,00	84.16	18.107.546,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	98.000,00	49.260,00	50.27	52.627,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	355.000.000,00	345.480.395,00	97.32	376.730.351,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.639.000,00	7.920.387,00	82.17	35.379.162,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.917.000,00	23.761.160,00	82.17	0
	Jumlah	5.379.916.000,00	5.291.684.096,00	98.03	5.777.505.320,00

5.1.2.1.1.2 **Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp 5.378.938.097,00**

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp, 5.412.145.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 5.378.938.907,00 atau 99.39 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 5.855.393.307,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.412.145.000,00	5.378.938.097,00	99.39	5.855.393.307,00
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN				
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				
5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
Jumlah	5.412.145.000,00	5.378.938.097,00	99.39	5.855.393.307,00

5.1.2.1.1.3 **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp,00**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 3.394.824.604,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (3.394.824.604,00) dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD					
4 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD					
5 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD					
6 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					
7 Belanja Honorarium					
8 Belanja Jasa Pengelolaan BMD					
9 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya				3.394.824.604,00	(3.394.824.604,00)
Jumlah				3.394.824.604,00	(3.394.824.604,00)

5.1.2.1.2 **Belanja Barang dan Jasa Rp 19.661.158.832,32**

Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi sebesar Rp, 19.66111.158.832,32, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 7.018.695.243,95 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 12.642.463.588,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Barang	3.657.993.616,00	1.385.849.100,00	2.272.144.516,00
2 Belanja Jasa	4.564.415.150,32	3.008.817.157,95	1.555.597.992,00
3 Belanja Pemeliharaan	435.491.900,00	402.656.450,00	32.835.450,00
4 Belanja Perjalanan Dinas	2.047.258.166,00	2.221.372.536,00	(174.114.370,00)
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.956.000.000,00	0	8.956.000.000,00
6 Belanja Barang dan Jasa BOP			
7 Belanja Barang dan Jasa BOS			
8 Belanja Barang dan Jasa BLUD			
Jumlah	19.661.158.832,32	7.018.695.243,95	12.642.463.588,00

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.1.2.1 **Belanja Barang Rp 3.757.845.116,00**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp, 3.764.711.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 3.757.845.116,00 atau 99.82 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.517.255.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.861.000,00	2.970.990.366,00	99.90	672.045.700,00
2 Belanja Cetak/Penggandaan	249.135.000,00	247.192.750,00	99.22	134.441.600,00
3 Belanja Makanan dan Minuman	541.715.000,00	539.662.000,00	99.62	636.133.400,00
4 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0	0	0	74.635.000,00
Jumlah	3.764.711.000,00	3.757.845.116,00	99.82	1.517.255.700,00

5.1.2.1.2.2 **Belanja Jasa Rp 4.863.330.615,00**

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp, 4.931.471.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 4.863.330.615,00 atau 98.62 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 2.898.952.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	3.971.931.000,00	3.908.034.665,00	98.39	1.007.371.749,00
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	140.000.000,00	137.330.000,00	98.09	136.363.522,00
3 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	5.500.000,00	100	248.975.000,00
4 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	12.000.000,00
5 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.262.000,00	12.992.000,00	97.96	0
6 Belanja Jasa Konsultansi	768.278.000,00	767.273.950,00	99.87	1.450.111.789,00
7 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	32.500.000,00	32.200.000,00	99.08	44.130.000,00
Jumlah	4.931.471.000,00	4.863.330.615,00	98.62	2.898.952.060,00

5.1.2.1.2.3 **Belanja Pemeliharaan Rp 434.491.900,00**

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp, 444.906.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 435.491.900,00 atau 97.88 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 402.656.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Belanja Pemeliharaan Tanah	0	0	0	0
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.380.000,00	128.350.000,00	99.98	75.940.500,00
3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.480.000,00	140.282.000,00	99.86	149.955.000,00
4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	0
5 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	176.046.000,00	166.859.900,00	94.78	176.760.950,00
Jumlah	444.906.000,00	435.491.900,00	97.88	402.656.450,00

5.1.2.1.2.4 **Belanja Perjalanan Dinas Rp 2.047.258.166,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp, 2.052.186.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 2.047.258.166,00 atau 99.76 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 2.221.372.536,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.886.813.000,00	1.883.637.653,00	99.83	1.900.012.512,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	165.373.000,00	163.620.513,00	98.94	321.360.024,00
Jumlah	2.052.186.000,00	2.047.258.166,00	99.76	2.221.372.536,00

5.1.2.1.2.5 **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp,00**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 7.482.286.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0		
2 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0		7.482.286.000,00
Jumlah	0	0		7.482.286.000,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga Rp,00

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat				
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain				
3	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
4	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
5	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)				
6	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD				
	Jumlah				

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi Rp,00

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN				
2	Belanja Subsidi kepada BUMD				
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta				
4	Belanja Subsidi kepada Koperasi				
	Jumlah				

5.1.2.1.5 Belanja Hibah Rp,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
3	Belanja Hibah kepada BUMN				
4	Belanja Hibah kepada BUMD				
5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
6	Belanja Hibah Dana BOS				
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
	Jumlah				

Belanja Hibah **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Rp 8.956.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp, 9.076.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 8.956.000.000,00 atau 98.68 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 8.956.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.076.000.000,00	8.956.000.000,00	98.68	0	8.956.000.000
2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					
3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					
4 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					
Jumlah	9.076.000.000,00	8.956.000.000,00	98.68	0	8.956.000.000

Belanja Bantuan Sosial **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.1.6.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp 8.956.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp 9.076.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 8.956.000.000,00 atau 98.68 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 8.956.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					
2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	9.076.000.000,00	8.956.000.000,00	98.68	0	8.956.000.000
Jumlah	9.076.000.000,00	8.956.000.000,00	98.68	0	8.956.000.000

5.1.2.1.6.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					
2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga					
Jumlah					

5.1.2.1.6.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					
2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					
Jumlah					

5.1.2.1.6.4 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					
2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					
Jumlah					

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp 78.276.500,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp, 78.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 78.276.500,00 atau 99.59 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 956.043.410,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Belanja Modal Tanah				
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.100.000,00	78.100.000,00	100	451.062.000,00
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000,00	176.500,00	35.30	504.981.410,00
6 Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah	78.600.000,00	78.276.500,00	99.59	956.043.410,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Tanah Persil					
2 Belanja Modal Tanah Non Persil					
3 Belanja Modal Lapangan					
Jumlah					

Belanja Modal Tanah **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 78.100.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp, 78.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 78.100.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 451.062.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1 Belanja Modal Alat Besar				
2 Belanja Modal Alat Angkutan				
3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				
4 Belanja Modal Alat Pertanian				
5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.100.000,00	24.100.000,00	100	114.015.000,00
6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.000.000,00	25.000.000,00	100	140.309.000,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
8 Belanja Modal Alat Laboratorium				
9 Belanja Modal Komputer	29.000.000,00	29.000.000,00	100	166.738.000,00
10 Belanja Modal Alat Eksplorasi				
11 Belanja Modal Alat Pengeboran				
12 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
13 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
14 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				
15 Belanja Modal Alat Peraga				
16 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				
17 Belanja Modal Rambu-rambu				
18 Belanja Modal Peralatan Olahraga				
19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
Jumlah	78.100.000,00	78.100.000,00	100	451.062.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar Rp,00

Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Besar Darat					
2 Belanja Modal Alat Besar Apung					
3 Belanja Modal Alat Bantu					
Jumlah					

5.1.2.2.2.2 **Belanja Modal Alat Angkutan Rp,00**

Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					
2 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
3 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor					
4 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor					
5 Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara					
Jumlah					

5.1.2.2.2.3 **Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur Rp,00**

Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					
2 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					
3 Belanja Modal Alat Ukur					
Jumlah					

5.1.2.2.2.4 **Belanja Modal Alat Pertanian Rp,00**

Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengolahan					
Jumlah					

5.1.2.2.2.5 **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 24.100.000,00**

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp, 24.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 24.100.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 144.015.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor				
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.100.000,00	24.100.000,00	100	144.015.000,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
	Jumlah	24.100.000,00	24.100.000,00	100	144.015.000,00

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 25.000.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp,25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp,25.000.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,140.309.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Studio	25.000.000,00	25.000.000,00	100	140.309.000,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi				
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar				
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi				
	Jumlah	25.000.000,00	25.000.000,00	100	140.309.000,00

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp,00

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran					
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum					
	Jumlah					

5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp,00

Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					
2	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir					
3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah					
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					
5	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan					

6	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya"	
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
8	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica"	
9	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	
	Jumlah	

5.1.2.2.2.9
Belanja Modal
Alat Persenjataan
Rp,00

Belanja Modal
 Alat Persenjataan dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau
 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami
 kenaikan/penurunan* sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Senjata Api				
2	Senjata Non Senjata Api				
3	Senjata Sinar				
4	Alat Khusus Kepolisian				
	Jumlah				

5.1.2.2.2.10
Belanja Modal Komputer
Rp 29.000.000,00

Belanja Modal
 Komputer dianggarkan sebesar Rp, 29.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 29.000.000,00 atau
 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 166.738.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Unit			117.348.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	29.000.000,00	29.000.000,00	100
	Jumlah	29.000.000,00	29.000.000,00	100

5.1.2.2.2.11
Belanja Modal Alat Eksplorasi
Rp,00

Belanja Modal
 Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau
 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami
 kenaikan/penurunan* sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi				
2	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika				
	Jumlah				

5.1.2.2.2.12 **Belanja Modal Alat Pengeboran Rp,00**

Belanja Modal Alat Pengeboran dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin					
2 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin					
Jumlah					

5.1.2.2.2.13 **Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp,00**

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Sumur					
2 Belanja Modal Produksi					
3 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian					
Jumlah					

5.1.2.2.2.14 **Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp,00**

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi					
2 Belanja Modal Alat Bantu Produksi					
Jumlah					

5.1.2.2.2.15 **Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp,00**

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Deteksi					
2 Belanja Modal Alat Pelindung					
3 Belanja Modal Alat SAR					
4 Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan					
Jumlah					

5.1.2.2.2.16 **Belanja Modal Alat Peraga Rp,00**

Belanja Modal Alat Peraga dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan				
2	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan				
3	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya				
	Jumlah				

5.1.2.2.2.17 **Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp,00**

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi				
	Jumlah				

5.1.2.2.2.18 **Belanja Modal Rambu-Rambu Rp,00**

Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat				
2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara				
3	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut				
	Jumlah				

5.1.2.2.2.19 **Belanja Modal Alat Olahraga Rp,00**

Belanja Modal Alat Olahraga dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik				
2	Belanja Modal Peralatan Permainan				
3	Belanja Modal Peralatan Senam				
4	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air				
5	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara				
6	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya				
	Jumlah				

5.1.2.2.2.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS					
	Jumlah					

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung					
2	Belanja Modal Monumen					
3	Belanja Modal Bangunan Menara					
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					
	Jumlah					

Belanja Modal Gedung dan Bangunan **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					
2	Belanja Modal Bangunan Air					
3	Belanja Modal Instalasi					
4	Belanja Modal Jaringan					
	Jumlah					

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 176.500,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp, 500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 176.500,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 504.981.410,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	500.000,00	176.500,00	35.30	22.754.500,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga				
3	Belanja Modal Hewan				
4	Belanja Modal Biota Perairan				
5	Belanja Modal Tanaman				
6	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya				
7	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				482.226.910,00
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
	Jumlah	500.000,00	176.500,00	35.30	504.981.410,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **tidak mencapai target*** dikarenakan : Kondisi saat ini sementara kebutuhan sudah terpenuhi dan Efisiensi dalam pembelian bahan bacaan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp 176.500,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp, 500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 176.500,00 atau 35.30 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 22.754.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	500.000,00	176.500,00	35.30	22.754.500,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro				
3	Belanja Modal Kartografi,Naskah, Dan Lukisan Lainnya				
4	Belanja Modal Musik				
5	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Material) Lainnya"				
6	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita				
7	Belanja Modal Tarscalt				
	Jumlah	500.000,00	176.500,00	35.30	22.754.500,00

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Rp,00

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian					
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan					
3	Belanja Modal Tanda Penghargaan					
	Jumlah					

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Hewan Rp,00

Belanja Modal Hewan dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Hewan Piaraan					
2	Belanja Modal Ternak					
3	Belanja Modal Hewan Lainnya					
	Jumlah					

5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Biota Perairan Rp,00

Belanja Modal Biota Perairan dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces / Ikan Bersirip)					
2	Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)					
3	Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)					
4	Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)					
5	Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)					
6	Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)					
7	Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)					
8	Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)					
9	Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)					
10	Belanja Modal Biota Perairan Lainnya					
	Jumlah					

5.1.2.2.5.5 Belanja Modal Tanaman Rp,00

Belanja Modal Tanaman dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanaman					
	Jumlah					

5.1.2.2.5.6 **Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Rp,00**

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya					
	Jumlah					

5.1.2.2.5.7 **Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp,00**

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,482.226.910,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (482.226.910,00) dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				482.226.910,00	482.226.910,00
	Jumlah				482.226.910,00	482.226.910,00

5.1.2.2.5.8 **Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp,00**

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					
	Jumlah					

5.1.2.2.5.9 **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS					
	Jumlah					

5.1.2.2.6 **Belanja Modal Aset Lainnya**

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud					
2 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain					
Jumlah					

Belanja Modal Aset Lainnya **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Rp,00

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Tidak Terduga					
Jumlah					

Belanja Tidak Terduga **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.4 Belanja Transfer Rp,00

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Bagi Hasil					
Belanja Bantuan Keuangan					
Jumlah					

5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH Rp,00

Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan					
2 Pengeluaran Pembiayaan					
Jumlah					

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp 27.270.537.410,42

Total Aset sebesar Rp, 27.270.537.410,42 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 27.444.429.864,55. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Aset Lancar	100.598.872,06	88.400.507,38
2 Investasi Jangka Panjang	0	0
3 Aset Tetap	26.823.025.778,36	27.356.029.357,17
4 Dana Cadangan	0	0
5 Aset Lainnya	346.912.760,00	0
Jumlah	27.270.537.410,42	27.444.429.864,55

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 100.598.872,06

Aset Lancar sebesar Rp, 100.598.872,06 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 88.400.507,38 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas		
2 Investasi Jangka Pendek		
3 Piutang Pajak Daerah		
4 Piutang Retribusi Daerah		
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
8 Piutang Transfer Antar Daerah		
9 Piutang Lainnya		
10 Penyisihan Piutang		
11 Beban Dibayar Dimuka	99.822.372,06	87.650.507,38
12 Persediaan	776.500,00	750.000,00
Jumlah	100.598.872,06	88.400.507,38

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp 99.822.372,06

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp, 99.822.372,06 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 87.650.507,38 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	99.822.372,06	87.650.507,38
Jumlah	99.822.372,06	87.650.507,38

5.2.1.1.2 Persediaan Rp 776.500,00

Persediaan sebesar Rp, 776.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	776.500,00	750.000,00
2 Barang Tak Habis Pakai		
3 Barang Bekas Pakai		
Jumlah	776.500,00	750.000,00

5.2.1.1.12.1 **Barang Pakai Habis Rp 776.500,00**

Barang Pakai Habis sebesar Rp, 776.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 750.000, dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bahan		
2 Suku Cadang		
3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	776.500,00	750.000,00
4 Obat-Obatan		
5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan		
6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
7 Natura dan Pakan		
8 Persediaan Penelitian		
9 Persediaan dalam Proses		
Jumlah	776.500,00	750.000,00

5.2.1.1.12.5.1 **Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 776.500,00**

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp, 776.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Tulis Kantor		
2 Kertas dan Cover	731.500,00	750.000,00
3 Bahan Cetak		
4 Benda Pos		
5 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
6 Bahan Komputer		
7 Perabot Kantor		
8 Alat Listrik	45.000,00	
9 Perlengkapan Dinas		
10 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa		
11 Perlengkapan Pendukung Olahraga		
12 Suvenir/Cendera Mata		
13 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
Jumlah	776.500,00	750.000,00

5.2.1.2 **INVESTASI JANGKA PANJANG Rp,00**

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
2 Investasi Jangka Panjang Permanen		
Jumlah		

5.2.1.3 **Aset Tetap Rp 26.823.025.778,36**

Aset Tetap sebesar Rp, 26.823.025.778,36 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 27.356.029.357,17 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tanah	17.413.941.740,00	17.413.941.740,00
2 Peralatan dan Mesin	10.091.604.117,00	9.913.679.117,00
3 Gedung dan Bangunan	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
5 Aset Tetap Lainnya	147.230.400,00	147.053.900,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	749.565.400,00	749.565.400,00
7 Akumulasi Penyusutan	(12.199.434.938,64)	(11.488.329.859,83)
Jumlah	26.823.025.778,36	27.356.029.357,17

5.2.1.3.1 Tanah Rp 17.413.941.740,00

Tanah sebesar Rp, 17.413.941.740,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 17.413.941.740,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 0 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tanah Persil	1.513.941.741,00	1.513.941.741,00
2 Tanah Non Persil	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00
3 Lapangan		
Jumlah	17.413.941.740,00	17.413.941.740,00

5.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin Rp 10.091.604.117,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp, 10.091.604.117,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 9.913.679.117,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 177.925.000,00 atau 1.79 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Besar	526.280.900,00	526.280.900,00
2 Alat Angkutan	4.156.418.720,00	4.156.418.720,00
3 Alat Bengkel dan Ukur		
4 Alat Pertanian		
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.126.866.512,00	3.077.766.512,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	600.255.496,00	600.255.496,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan		
8 Alat Laboratorium		
9 Alat Persenjataan		
10 Komputer	1.571.857.489,00	1.542.857.489,00
11 Alat Eksplorasi		
12 Alat Pengeboran		
13 Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurniaan		
14 Alat Bantu Eksplorasi		
15 Alat Keselamatan Kerja		
16 Alat Peraga	99.825.000,00	
17 Peralatan Proses/Produksi		
18 Rambu-Rambu		
19 Alat Olahraga	10.100.000,00	10.100.000,00
Jumlah	10.091.604.117,00	9.913.679.117,00

5.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp 10.620.119.060,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp, 10.620.119.060,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 10.620.119.060,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 0 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bangunan Gedung	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
2 Monumen		
3 Bangunan Menara		
4 Tugu Titik Kontrol/Pasti		
Jumlah	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00

5.2.1.3.4 **Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp,00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan		
2	Bangunan Air		
3	Instalasi		
4	Jaringan		
	Jumlah		
2	Jaringan Listrik		
3	Jaringan Telepon		
4	Jaringan Gas		
	Jumlah		

5.2.1.3.5 **Aset Tetap Lainnya Rp 147.230.400,00**

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp, 147.230.400,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 147.053.900,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 176.500,00 atau 0.12 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	147.060.400,00	146.883.900,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	170.000,00	170.000,00
3	Hewan		
4	Biota Perairan		
5	Tanaman		
6	Barang Koleksi Non Budaya		
7	Aset Tetap Dalam Renovasi		
	Jumlah	147.230.400,00	147.053.900,00

5.2.1.3.6 **Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 749.565.400,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp, 749.565.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 749.565.400,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 0 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	749.565.400,00	749.565.400,00
	Jumlah	749.565.400,00	749.565.400,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	DS GIRIMOYO, KAB. WONOGIRI	70.086.000	16/06/2014
2	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	KELURAHAN PLAMONGANSARI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	640.337.000	26/10/2020
3	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM Pengerjaan	JL.MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG	39.142.400	22/10/2020

5.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp (12.199.434.938,64)

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp,(12.199.434.938,64) , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (11.488.329.859,83) mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (711.105.078.81) atau 6.19 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.084.519.404,44)	(8.585.244.242,00)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.114.915.534,20)	(2.903.085.617,83)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Jumlah	(12.199.434.938,64)	(11.488.329.859,83)

5.2.1.4 Dana Cadangan Rp,00

Dana Cadangan sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Dana Cadangan		
Jumlah		

5.2.1.5 Aset Lainnya Rp 346.912.760,00

Aset Lainnya sebesar Rp, 346.912.760,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 346.912.760 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tagihan Jangka Panjang		
2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
3 Aset Tidak Berwujud	578.387.600,00	
4 Aset Lain-lain		
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(231.474.840,00)	
6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah	346.912.760,00	

5.2.1.5.1 Aset Tak Berwujud Rp 578.387.600,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp, 578.387.600,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 578.387.600,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Aset Tidak Berwujud-Goodwill		
2 Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise		
3 Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta		
4 Aset Tidak Berwujud-Hak Paten		
5 Aset Tidak Berwujud-Software	578.387.600,00	
6 Aset Tidak Berwujud-Kajian		
7 Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya		
8 Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan		
9 Aset Tidak Berwujud-Lainnya		
Jumlah	578.387.600,00	

5.2.1.5.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp (231.474.840,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp,(231.474.840,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (231.474.840,00) atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise		
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta		
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten		
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(231.474.840,00)	
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian		
6 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Aset Tak Berwujud Lainnya		
Jumlah	(231.474.840,00)	

5.2.2 KEWAJIBAN Rp,00

Kewajiban sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek		
2 Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah		

5.2.3 EKUITAS Rp 27.270.537.410,42

Ekuitas sebesar Rp, 27.270.537.410,42 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 27.444.429.864,56 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp, (173.892.454,14) atau -0.63 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Ekuitas	(34.044.576.466,58)	(3.061.859.522,44)
2 Ekuitas SAL		
3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	61.315.113.887,00	30.506.289.387,00
Jumlah	27.270.537.410,42	27.444.429.864,56

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	0	0	0
2	Beban	(31.066.863.077,46)	(30.311.717.407,83)	(755.145.669,63)
	Surplus/(Defisit) Operasional			
3	Kegiatan Non Operasional	0	12.806.740	
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
4	Pos Luar Biasa	0	0	
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(31.066.863.077,46)	(30.298.910.667,83)	

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO						
2	Pendapatan Transfer-LO						
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO						
	Jumlah						

5.3.2 BEBAN DAERAH Rp 31.066.863.077,46

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp, 31.066.863.077,46 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 30.311.717.407,83 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,755.145.669,63 atau 2.49 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	30.331.781.025,32	29.558.704.474,95	773.076.550,00	2.62
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	735.082.052,14	753.012.932,88	2.283.367.889,63	303.23
3	Beban Transfer	0	0	0	0
	Jumlah	31.066.863.077,46	30.311.717.407,83	755.145.669,63	2.49

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp 30.331.781.025,32

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp, 30.331.781.025,32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 29.558.704.474,95 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,773.076.550,00 atau 2.62 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pegawai	10.670.622.193,00	15.027.723.231,00	(4.357.101.038,00)	(28.99)
2 Beban Barang dan Jasa	19.661.158.832,32	7.018.695.243,95	12.642.463.588,00	180.13
3 Beban Bunga	0	0		
4 Beban Subsidi	0	0		
5 Beban Hibah	0	0		
6 Beban Bantuan Sosial	0	7.482.286.000,00	(7.482.286.000,00)	(100)
7 Beban Penyisihan Piutang	0	0		
8 Beban Lain-Lain	0	0		
Jumlah	30.331.781.025,32	29.558.704.474,95	773.076.550	2.62

5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp 10.670.622.193,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp, 10.670.622.193,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,15.027.723.231,00 mengalami kenaikan/penurunan* sebesar Rp,(4.357.101.038,00) atau (28.99) % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.291.684.096,00	5.777.505.320,00	(485.821.244,00)	(8.41)
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.378.938.097,00	5.855.393.307,00	(476.455.210,00)	(8.41)
3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	3.394.824.604,00	(3.394.824.604,00)	(100)
4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD				
5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
7 Beban Pegawai BOS				
8 Beban Pegawai BLUD				
Jumlah	10.670.622.193,00	15.027.723.231,00	(4.357.101.038,00)	(28.99)

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp 19.661.158.832,32

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp, 19.661.158.832,32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 7.018.695.243,95 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 12.642.463.588,00 atau 180.13% dengan rincian sebagai berikut :

	2021(Rp)	2020(Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Barang	3.657.993.616,00	1.385.849.100,00	2.272.144.516,00	163.95
2 Beban Jasa	4.564.415.150,32	3.008.817.157,95	1.555.597.992,00	51.70
3 Beban Pemeliharaan	435.491.900,00	402.656.450,00	32.835.450,00	8.15
4 Beban Perjalanan Dinas	2.047.258.166,00	2.221.372.536,00	(174.114.370,00)	(7.84)
5 Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.956.000.000,00	0	8.956.000.000,00	100
6 Beban Barang dan Jasa BOP				

		2021(Rp)	2020(Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
7	Beban Barang dan Jasa BOS				
8	Beban Barang dan Jasa BLUD				
	Jumlah	19.661.158.832,32	7.018.695.243,95	12.642.463.588,00	180.13

5.3.2.1.3 Beban Bantuan Sosial Rp,00

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,7.482.286.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,(7.482.286.000,00) atau (100) % dengan rincian sebagai berikut :

		2021(Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu				
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga				
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0	7.482.286.000,00	(7.482.286.000,00)	(100)
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
	Jumlah	0	7.482.286.000,00	(7.482.286.000,00)	(100)

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp 735.082.052,14

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp, 735.082.052,14 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,753.012.932,88 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp, 2.283.367.889,63 atau % dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	499.275.162,44	541.183.016,50	(41.907.854,00)	(7.74)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	211.829.916,37	211.829.916,37	0	0
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0	0
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0	0
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	23.976.973,33	0	23.976.973,33	100
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	735.082.052,14	753.012.932,88	2.283.367.889,63	303.23

5.3.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp 499.275.162,44

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp, 499.275.162,44 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,541.183.016,50 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (41.907.854,00) atau (7.74) % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	65.785.112,50	65.785.112,50	0	0
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	112.019.750,00	135.072.250,00	(23.052.500,00)	(17.07)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur				
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian				
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.719.066,65	153.401.504,00	(4.682.437,00)	(3.05)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi,	33.613.400,00	33.613.400,00	0	0

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
dan Pemancar				
7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan				
8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium				
9 Beban Penyusutan Komputer	134.949.083,33	150.785.750,00	(15.836.667,00)	(10.50)
10 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi				
11 Beban Penyusutan Alat Pengeboran				
12 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian				
13 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi				
14 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja				
15 Beban Penyusutan Alat Peraga	1.663.749,96	0	1.663.749,96	100
16 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi				
17 Beban Penyusutan Rambu-Rambu				
18 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	2.525.000,00	2.525.000,00	0	0
Jumlah	49.275.162,44	541.183.016,50	(41.907.854,00)	(7.74)

5.3.2.2.2 Gedung dan Bangunan Rp 211.829.916,37

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp, 211.829.916,37 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,211.829.916,38 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 0 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung	211.829.916.37	211.829.916.38	0	0
2 Beban Penyusutan Monumen				
3 Beban Penyusutan Bangunan Menara				
4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti				
Jumlah	211.829.916.37	211.829.916.38	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.3.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp 23.976.973,33

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp,23.976.973,33 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,23.976.973,33 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise				
2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta				
3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten				
4 Beban Amortisasi Software	23.976.973,33	0	23.976.973,33	100
5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian				
Jumlah	23.976.973,33	0	23.976.973,33	100

5.3.2.3 BEBAN TRANSFER Rp,00

Beban Transfer terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penuru nan (Rp)	Tren %
1 Beban Bagi Hasil						
2 Beban Bantuan Keuangan						
Jumlah						

5.3.3 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL

5.3.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL Rp,00

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan(Rp)	Tren %
1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				
Jumlah				

5.3.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				
Jumlah				

5.3.4 POS LUAR BIASA Rp,00

Pos Luar Biasa terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah				

5.3.4.1 PENDAPATAN LUAR BIASA Rp,00

Pendapatan Luar Biasa terealisasi sebesar Rp,00.

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	27.444.429.864,56	26.609.520.885,39
2	Surplus/Defisit-LO	(31.066.863.077,46)	(30.298.910.667,83)
3	RK-PPKD	30.808.824.490,00	30.506.289.387,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	84.146.133,32	627.530.260,00
Ekuitas Akhir		27.270.537.410,42	27.444.429.864,56

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp, 27.444.429.864,56 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp, 31.066.863.077,46) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2021.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp, 84.146.133,32 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Koreks/Penyesuaian Kas	0	0
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	0	0
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	0	0
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	0	0
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	0	0
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	0	0
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	0	0
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	0	640.337.000,00
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	0	(12.806.740,00)
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	84.146.133,33	0
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	0	0
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	0	0
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	0	0
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	0	0
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	(0.01)	0
Jumlah		84.146.133,32	627.530.260,00

5.6.3 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp,27.270.537.410,42 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Akhir	27.270537.410,42	27.444.429.864,56
Jumlah		27.270537.410,42	27.444.429.864,56

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisiensi.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsep pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Gubernur (*Strategic apex*),sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*Operating Core*), badan / fungsi penunjang (*Technostructure*), dan staf pendukung (*supportingstaff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*Technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan Pemerintah dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang, unsur staf diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah diwadahi daam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

diwadahi dalam Inspektorat.

Kepala Daerah, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Inspektur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggung jawaban tersebut sebagai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkurek, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan , pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian, sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan factor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandate yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah di Undangkan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga lain Daerah Provinsi Jawa Tengah,

sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau lagi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

6.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

6.2.1. Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.2.2. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas Pokok:

6.2.2..1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Permukiman dan Tata Ruang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

6.2.2.2. Melaksanakan kewenangan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersifat lintas Kabupaten / Kota.

6.2.2.3. Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.2.4. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.3. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi

6.2.3.1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

6.2.3.2. Pengoordinasian Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman, Pertanahan, dan Keterpaduan.

6.2.3.3. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan.

6.2.3.4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Keterpaduan.

6.2.3.5. Pelaksanaan dan Pembinaan Administrasi kesekretariatan kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas. dan

6.2.3.6. Pelaksanaan Fungsi dinas lain yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan tugasnya.

6.3 Susunan Organisasi:

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan keterpaduan berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun tugas-tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas, membawahi:
 - a) Sekretariat
 - b) Bidang Perumahan
 - c) Bidang Kawasan Permukiman
 - d) Bidang Keterpaduan Perumahan dan Keterpaduan Kawasan Permukiman
 - e) Bidang Pertanahan
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian,

Sekretariat membawahkan :

a) Sub Bagian Program

Subbagian program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

c) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

3) Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, Koordinasi dan pelaksanaan Kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis dan pembiayaan perumahan, perumahan umum serta perumahan swadya, membawahkan :

a) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan.

b) Seksi Perumahan Umum

Seksi Perumahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporandi bidang perumahan Umum, menyiapkan bahan penyediaan rumah korban bencana alam, bahan fasilitasi penyediaan rumah relokasi program pemerintah daerah, menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah susun dan rumah khusus serta rumah tapak sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah tapak sederhana.

c) Seksi Perumahan Swadya

Seksi Perumahan Swadya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibiadng perumahan swadaya, bahan perumusan sosialisasi, bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan, pemugaranrumah dan pemanfaatan rumah bagi korban bencana alam.

4) Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang perencanaan teknis kawasan permukiman, dan peningkatan kualitas permukiman . Bidang Kawasan Permukiman membawahkan :

a) Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Perumahan

Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, meliputi : penyiapan kebijakan Teknis, bahan pengkoordinasian bahan penyusunan dan petunjuk teknis, bahan perencanaan teknis, bahan bimbingan teknis dan supervise pengembangan prasarana sarana utilitas, bahanevaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

b) Seksi Pengembangan Prasarana Utilitas Kawasan

Seksi Pengembangan Prasarana Utilitas Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi : perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengkajian prasarana dan sarana utilitas, bahan pengembangan jejaringan kemitraan pengembangan prasarana dan sarana utilitas dan

evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana utilitas kawasan permukiman.

c) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman, meliputi : perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan bahan bimbingan teknis dan supervisi, bahan pengkajian dan penyusunan inovasi, peningkatan kualitas pengembangan jejaringan kemitraan bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman.

5) Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, keterpaduan infrastruktur, pembinaan dan evaluasi perumahan serta permukiman, membawahkan:

a) Seksi Pengelola Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Seksi Pengelola Data Permukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan meliputi : penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, bahan penyusunan data base perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan.

b) Seksi Keterpaduan Infrastruktur.

Seksi Keterpaduan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keterpaduan infrastruktur meliputi : penyiapan Bahan kebijakan teknik, bahan pengkoordinasian, bahan penyusunan dan inventaris rencana induk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana pembangunan dan pengembangan, rencana strategis perumahan dan kawasan permukiman, monitoring pelaksanaan penyusunan dan perumusan rencana strategis 5 (lima) tahun dan tahunan, bahanfasilitasi program kemitraan pembangunan

infrastruktur dan pertanahan, bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keterpaduan infrastruktur.

c) Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan evaluasi perumahan, permukiman dan pertanahan meliputi : pelaksanaan pengawasan, pembinaan teknis dan pengendalian, evaluasi kinerja, implementasi hasil rekayasa teknologi, fasilitasi sertifikasi dan registrasi bagi orang / badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana utilitas umum dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan evaluasi perumahan, permukiman dan pertanahan.

6) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan. Bidang pertanahan membawahkan :

a) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pengoordinasian, bahan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah, penetapan lokasi tanah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan, bahan fasilitasi kegiatan pengadaan / pembebasan tanah untuk asset daerah beserta sertifikatnya, penetapan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah, mengevaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan tanah.

b) Seksi Permasalahan Pertanahan

Seksi Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pertanahan kabupaten / kota, menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh

pemerintah daerah, bahan inventaris pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten / kota dan penyelesaian masalah fasilitas dipermasalah pertanahan,

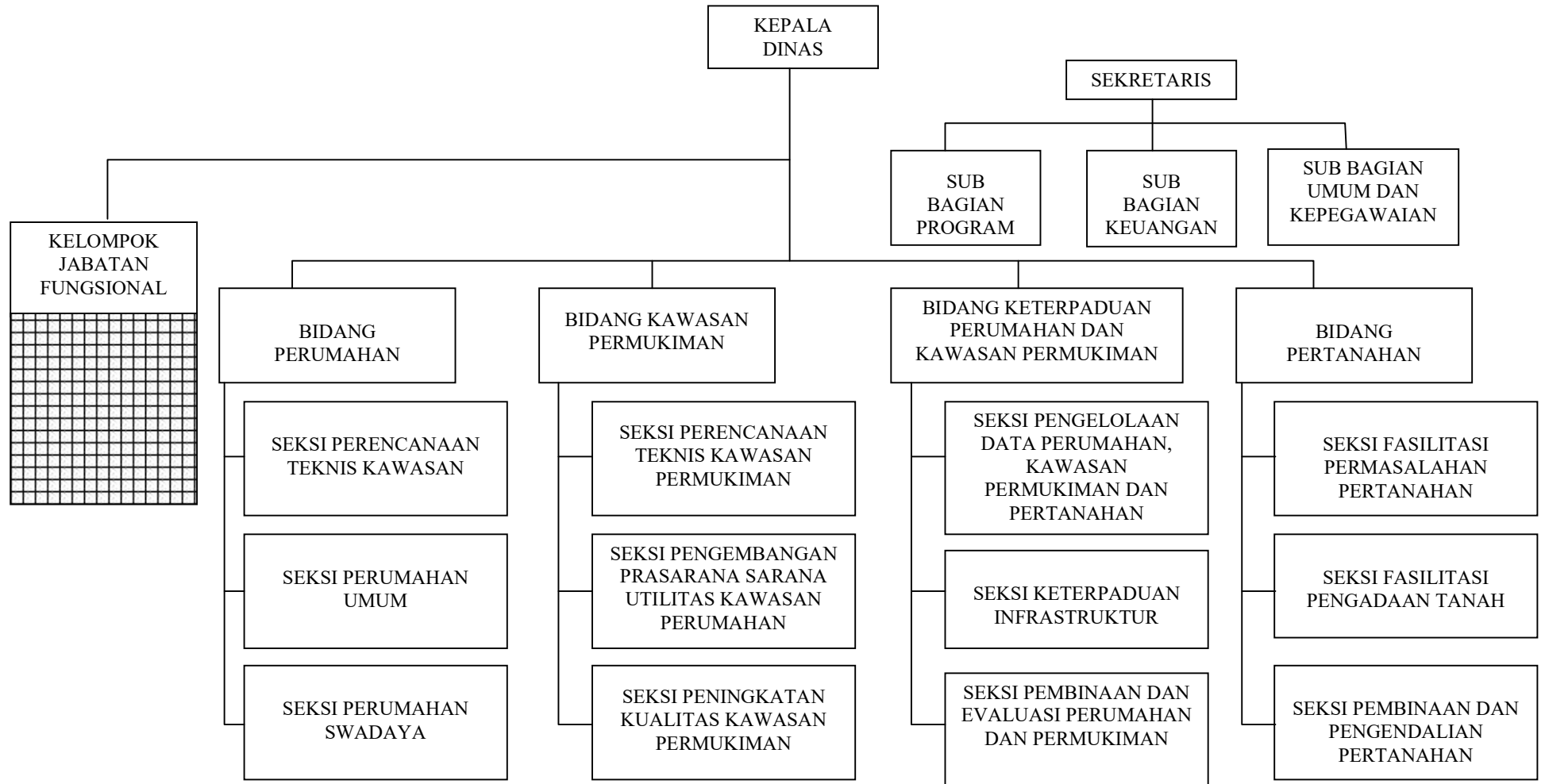
c) Seksi pembinaan dan Pengendalian Lahan

Seksi pembinaan dan Pengendalian pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian lahan, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pengoordinasian, bahan fasilitasi peningkatan peran masyarakat, menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / kota, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengendalian pertanahan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berikut struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Gambar Struktur Organisasi

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran 2021. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi , sosial maupun kebijakan yang akan ditetapkan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 12/Rekon/I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua. yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **RUDI NUGROHO, S.E., M.M.**
NIP : 19700524 199603 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SLAMET, AK**
NIP : 19660215 198603 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

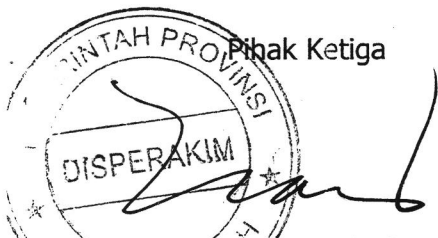
Nama : **NOVA ADIWIDANTO, S.Hut., M.Si.**
NIP : 19731113 199803 1 003
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data realisasi APBD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Semarang, 13 Januari 2022

Pihak Ketiga



NOVA ADIWIDANTO, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731113 199803 1 003

Pihak Kedua



SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

Pihak Pertama



RUDI NUGROHO, S.E., M.M.
NIP. 19700524 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Lampiran I

REKONSILIASI REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021

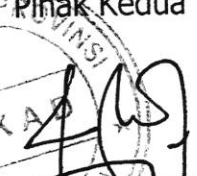
Uraian	Realiasi Bid Akt BPKAD (Rp)	Realisasi SKPD (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	-	-		
Pajak Daerah	-	-		
Retribusi Daerah	-	-		
Lain-Lain PAD yang Sah	-	-		
Belanja				
Belanja Pegawai	10.670.622.193	10.670.622.193		
Belanja Barang dan Jasa	11.103.925.797	11.103.925.797		
Belanja Subsidi	-	-		
Belanja Hibah	-	-		
Belanja Bantuan Sosial	8.956.000.000	8.956.000.000		
Belanja Modal	78.276.500	78.276.500		

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 terlampir.

Pinak Ketiga


NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.,M.Si.
NIP. 19731113 199803 1 003

Pinak Kedua


SLAMET. AK
NIP. 19660215 198603 1 001

Pinak Pertama


RUDI NUGROHO, S.E., M.M.
NIP. 19700524 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Lampiran II

REKONSILIASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021

Uraian	Rekapitulasi Kasda (Rp)	Rekapitulasi SKPD (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
Penerimaan				
Pendapatan	-	-		
<i>Contrapost</i> Belanja Pegawai	370.000	370.000		
<i>Contrapost</i> Belanja Barang & Jasa	27.407.500	27.407.500		
<i>Contrapost</i> Belanja Modal	-	-		
Pengembalian UP dan TU	1.042.539.538	1.042.539.538		
Total	1.070.317.038	1.070.317.038		
Pengeluaran (SP2D)				
LS Pegawai	10.670.992.193	10.670.992.193		
LS Barang & Jasa	12.177.615.916	12.177.615.916		
UP	412.788.000	412.788.000		
GU	3.204.148.055	3.204.148.055		
TU	5.413.597.364	5.413.597.364		
Total	31.879.141.528	31.879.141.528		

Rincian Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 terlampir.

Pihak Ketiga


NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.,M.Si.
NIP.19731113 199803 1 003

Pihak Kedua


SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

Pihak Pertama


RUDI NUGROHO, S.E., M.M.
NIP.19780524 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL . Sriwijaya No. 29 Semarang Kode Pos 50614
Telp. (024) 8311174 Faxc. 024 - 8311172
Laman Http://www.jatengprov.go.id Surat Elektrik : bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA
PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ANTARA BPKAD PROV. JATENG DAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 030/8.2/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh dua** bertempat di Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Lantai 12 Gedung A Setda, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama : TITIS WURYANINGSIH
NIP : 19730528 199903 2 005
Jabatan : Staf subbid Penatausahaan Barang Daerah dan Penetapan Status Penggunaan Barang Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sebagai "PIHAK KESATU"
- Nama : BAMBANG TRIONO.
NIP : 19760113 200701 1 006
Jabatan : Pengurus Barang
DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah sebagai "PIHAK KEDUA"

Dengan berdasarkan Undangan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/1701 tanggal 3 Januari 2022, kedua belah pihak telah melakukan Coklit (Pencocokan dan penelitian) data Aset Barang Milik Daerah hasil pengadaan/perolehan Tahun Anggaran 2021 sebagai Barang Pengguna berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dari belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perolehan Lain yang sah yang akan tercatat Nilai Neraca Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Aset Persediaan

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2021		SALDO AKHIR PERIODE 202112	
		Jml.	Harga	Jml.	Harga
1	2	3		4	
1	1.1.7.01.01 BAHAN		-	-	-
2	1.1.7.01.02 SUKU CADANG	-	-	-	-
3	1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	30	750.000,00	32	776.500,00
4	1.1.7.01.04 OBAT-OBATAN	-	-	-	-
5	1.1.7.01.05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	-	-	-	-
6	1.1.7.01.06 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-

7	1.1.7.01.07	NATURA DAN PAKAN	-	-	-	-
8	1.1.7.01.08	PERSEDIAAN PENELITIAN	-	-	-	-
9	1.1.7.01.09	PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-	-	-
10	1.1.7.02.01	KOMPONEN	-	-	-	-
11	1.1.7.02.02	P I P A	-	-	-	-
12	1.1.7.03.01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS	-	-	-	-
			30	750.000,00	32	776.500,00

2. Aset Tetap

Bertambah

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sejumlah 1.928 buah senilai Rp.39.002.460.717 bertambah sejumlah 75 buah senilai Rp.232.171.500,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Modal :

- a. Alat kantor dan rumah tangga sejumlah 4 buah senilai Rp.24.100.000,- berupa :
 - 1 Kursi Putar senilai Rp.10.300.000,-
 - 3 Kursi Tangan senilai Rp.13.800.000,-
- b. Alat studio komunikasi dan pemancar sejumlah 1 buah senilai Rp.25.000.000,- terdiri dari :
 - Smart TV senilai Rp.25.000.000,-
- c. Alat komputer sejumlah 3 buah senilai Rp.29.000.000,- terdiri dari :
 - 2 Personal Komputer senilai Rp.12.000.000,-
 - 1 Laptop senilai Rp.17.000.000,-
- d. Bahan Perpustakaan Sejumlah 1 buah senilai Rp.176.500,- terdiri dari :
 - 1 buku mendak.

2) Belanja Barang Jasa

- a. Alat Peraga sejumlah 60 buah senilai Rp.99.825.000,- terdiri dari :
 - 48 cetakan ruspin (moulding K1) senilai Rp.82.260.000,-
 - 12 cetakan ruspin (moulding K2) senilai Rp.17.565.000,-

3. Reklasifikasi :

Bertambah

- a. Reklasifikasi karena adanya ketidak sesuaian antara pemilihan akun rekening belanja, sehingga dilakukan reklas dari rekening belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga ke alat Studio Komunikasi dan Pemancar sejumlah 1 buah senilai Rp.25.000.000,-
- b. Reklasifikasi karena adanya ketidak sesuaian antara pemilihan akun rekening belanja, sehingga dilakukan reklas dari rekening belanja Alat Komputer lainnya ke alat Komputer sejumlah 3 buah senilai Rp.29.000.000,-
- c. Rekrasifikasi karena adanya ketidak sesuaian antara pemilihan akun rekening belanja, sehingga dilakukan reklas dari rekening belanja Barang Bercorak Kesenian Budaya ke Barang Bercorak Lukisan sejumlah 2 buah senilai Rp.70.000,-

Berkurang

Nilai Aset Tetap Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 berkurang sejumlah 4 buah senilai Rp.54.070.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Reklasifikasi :

- a. Reklasifikasi Keluar Alat Komunikasi dan Pemancar sejumlah 1 buah senilai Rp.25.000.000,- karena adanya ketidak sesuaian antara pemilihan akun rekening belanja.
- b. Reklasifikasi Keluar Alat Komputer sejumlah 3 buah senilai Rp.29.000.000,- karena adanya ketidak sesuaian antara pemilihan akun rekening belanja.
- c. Rekrasifikasi Keluar Barang Bercorak Kesenian sejumlah 2 buah senilai Rp.70.000,- karena adanya ketidak sesuaian antara pemilihan akun rekening belanja.

4. Aset Tak Berwujud

Bertambah

Nilai Aset Tak Berwujud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sejumlah 6 buah senilai Rp.578.387.600,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Software Alosista/Klinik PKP 1 buah senilai Rp 286.743.600,-
- 2) Software Basis Data PKP 1 buah senilai Rp. 94.476.000,-
- 3) Software Sikunang Tanah 1 buah senilai Rp. 79.430.000,-
- 4) Website Disperakim 1 buah senilai Rp. 48.615.000,-
- 5) Software Simperum 1 buah senilai Rp. 49.400.000,-
- 6) Website PPID 1 buah senilai Rp. 19.723.000,-

5. Aset lainnya

Nilai aset lainnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 "NIHIL"

6. Aset yang Dimanfaatkan

Nilai Aset yang Dimanfaatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 "NIHIL".

7. Ekstrakomptabel

Bertambah

Nilai Aset Ekstrakomptabel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 "NIHIL"

Berkurang

Nilai Aset Ekstrakomptabel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 "NIHIL"

Pencocokan dan penelitian dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya tersaji dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Hasil pencocokan dan penelitian ini juga sebagai dasar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk laporan Neraca Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2021, yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Yang Melaksanakan Rekonsiliasi

1. Kepala Subid Penatausahaan BMD	Kasidi, SE	
-----------------------------------	------------	---

Titis Wuryaningsih	
Achmad Soleh	

2. Kepala Bidang Aset Daerah	Adi Raharjo, S.STP. M.Si	Bambang Triono	
3. Sekretaris Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah	Nova Adiwidanto, S.Hut. M.Si		



1.1.7.00 Aset Persediaan

Stok Opname aset persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sejumlah 32 senilai Rp.776.500,00 Rincian sebagai berikut:

No.	Akun	Objek PLU/Non PLU	Saldo Awal	Pembelian				Hibah	Distri busi	Koreksi	Retur	Jumlah	Nilai Perpetual	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.1.7.01.03.01.001		-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	289.000	BARANG PAKAI HABIS.ALAT TULIS
7	1.1.7.01.03.01.007		-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	26.000	BARANG PAKAI HABIS.PENGGARIS
9	1.1.7.01.03.01.010		-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	73.500	BARANG PAKAI HABIS.ALAT PEREKAT
13	1.1.7.01.03.02.001		-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	165.000	BARANG PAKAI HABIS.KERTAS HVS
15	1.1.7.01.03.02.002		-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	178.000	BARANG PAKAI HABIS.BERBAGAI KERTAS
17	1.1.7.01.03.06.010		-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	45.000	BARANG PAKAI HABIS.BATU BATERAI
Total												32	776.500	

1.3.0.00 Aset Tetap

Rp. 39.022.460.717,00

Nilai Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Unaudited setelah disusutkan sebesar Rp.39.022.460.717.00,- naik sebesar Rp.232.101.500,00 ,- atau 0,6 % dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.38.844.359.217,00 ,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2020		SALDO AKHIR TAHUN 2021	
	Jml.	Harga Perolehan	Jml.	Harga Perolehan
2	3	4	5	6
TANAH	2	17.413.941.740	2	17.413.941.740
PERALATAN DAN MESIN	1.044	9.913.679.117,00	1.112	10.091.604.117
BANGUNAN GEDUNG	8	10.620.119.060	8	10.620.119.060
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-
ASET TETAP LAINNYA	799	146.883.900	800	147.060.400
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	749.565.400	3	749.565.400
AKUMULASI PENYUSUTAN	1.015	8.934.334.740,06	1.052	9.045.468.317,18
JUMLAH		47.778.523.957		48.067.759.034

Mutasi Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 tercatat dengan harga perolehan yang terdiri dari belanja modal, barang jasa tahun 2021, reklas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2020		PENAMBAHAN		PELEPASAN		SALDO AKHIR TAHUN 2020	
		Jml.	Harga Perolehan (Rp.)	Jml.	Nilai Perolehan (Rp.)	Jml.	Nilai Perolehan (Rp.)	Jml.	Harga Perolehan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TANAH	2	17.413.941.740					2	17.413.941.740
2	PERALATAN DAN MESIN	1.044	9.913.679.117	8	78.100.000			1.112	10.091.604.117
3	BANGUNAN GEDUNG	8	10.620.119.060,00	-	-	-	-	8	10.620.119.060,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN			-	-	-	-	12	3.354.362.050
5	ASET TETAP LAINNYA	799	146.883.900,00	1	176.500,00	-	-	800	147.060.400,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	749.565.400,00	-	-	-	-	3	749.565.400,00
	JUMLAH	1.856	38.844.189.217	9	78.276.500	-	-	1.967	42.376.652.767

Nilai Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan rincian tambah dan kurang.

Penambahan Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sejumlah 73 buah senilai Rp.323.101.500,- dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Aset Tetap		
Saldo Awal	1.859	38.844.359.217
Penambahan		
Belanja Modal	9	78.276.500
Belanja Barang/Jasa	60	99.825.000
Hibah	-	-
Mutasi Masuk	-	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	4	54.000.000
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-	-
Koreksi	-	-
Jumlah	73	232.101.500

Berkurangnya aset tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dikarenakan :

Mutasi Keluar	-	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-	-
Koreksi	-	-
Jumlah	-	-
Grand Total	-	-

1.3.1.00 Tanah**Rp. 17.413.941.740**

Nilai Aset Tetap Tanah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 2 bidang senilai sebesar Rp.17.413.941.740,- tidak bertambah maupun berkurang.

1.3.2.00 Aset Tetap Peralatan dan Mesin**Rp. 10.091.604.117**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 1.112 unit senilai Rp.10.091.604.117 bertambah sejumlah 9 unit senilai Rp. **78.276.500**

1.3.2.01 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Besar**Rp.526.280.900,00**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Besar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 1 unit senilai Rp.526.280.900,00 bertambah sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 berasal dari belanja modal sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 berupa "NIHIL" dari belanja barang jasa sebagai kapitalisasi/pemeliharaan senilai Rp.0,00 berupa... dan dari reklasifikasi sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00 dari belanja...berupa "NIHIL" . Sedangkan berkurang sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 karena direklasifikasi ke aset tetap sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 berupa "NIHIL"ke alat... dan diklasifikasikan ke aset ekstrakomtabel sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00.

1.3.2.02 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkut Rp.4.156.418.720,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 31 unit senilai Rp.4.156.418.700,00, bertambah sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0 berasal dari belanja barang jasa sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 dan dari reklasifikasi sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00 .

1.3.2.03 Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 tidak mengalami penambahan dan pengurangan, "NIHIL"

1.3.2.04 Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00 terjadi penambahan "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 .

1.3.2.05 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.3.126.866.512,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 753 senilai Rp.3.126.866.512,00 bertambah sejumlah 5 unit senilai Rp.49.100.000,00 berasal dari belanja modal sejumlah 4 unit senilai Rp.24.100.000,00,-

1.3.2.06 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio Komunikasi dan Pemancar Rp.600.255.496,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio Komunikasi dan Pemancar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 45 senilai Rp.600.255.496,00 bertambah sejumlah 1 unit senilai Rp.25.000.000,00 berupa Smart TV dan direklas sejumlah 1 unit senilai Rp.25.000.000,00 dari belanja alat kantor dan rumah tangga berupa Smart TV ke Aset Alat studio Komunikasi dan Pemancar sejumlah 1 unit senilai Rp.25.000.000,00,-

1.3.2.07 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.08 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Laboratorium Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Laboratorium Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 bertambah sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 berasal dari belanja modal sejumlah "NIHIL" unit, senilai Rp.0,00 berupa..... dan dari reklasifikasi sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 dari belanja... berupa... . Sedangkan berkurang sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 dikarenakan direklasifikasi ke asset tetap berupa... alat...

1.3.2.09 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Persenjataan Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Persenjataan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.10 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer Rp.1.571.587.489,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Komputer Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 213 unit senilai Rp.1.571.587.489,00 bertambah sejumlah 6 unit senilai Rp.58.000.000,00 berasal dari belanja modal sejumlah 3 unit senilai Rp.29.000.000,00 berupa 2 unit personal komputer dan 1 unit laptop, dari belanja barang jasa sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 berupa...dan dari Reklasifikasi sejumlah 3 unit senilai Rp.29.000.000,00 dari belanja asset tetap berupa 2 unit personal komputer dan 1 unit laptop Sedangkan berkurang sejumlah 3 unit senilai Rp.29.000.000,00 karena direklasifikasi ke asset tetap berupa alat kompiuter lainnya ke alat komputer.

1.3.2.11 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Eksplorasi Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Eksplorasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.12 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pengeboran Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pengeboran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.13 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.14 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bantu Eksplorasi Rp.,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bantu Eksplorasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.15 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Keselamatan Kerja Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Keselamatan Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.16 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Peraga Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Peraga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.17 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Proses/Produksi Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Proses/Produksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.18 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rambu – Rambu Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rambu-rambu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.2.19 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Olah Raga Rp.10.100.000,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Olah Raga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 9 unit senilai Rp.10.100.000,00 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

1.3.3.01 Aset Tetap Bangunan Gedung Rp.10.620.119.060,00

Nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 8 unit senilai Rp.10.620.119.060,00 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

1.3.3.02 Aset Tetap Bangunan Monumen Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Bangunan Monumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.3.03 Aset Tetap Bangunan Menara Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Bangunan Menara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.3.04 Aset Tetap Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Tugu Titik Kontrol/Pasti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.4.00 Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Jalan/Jembatan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.4.01 Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.4.02 Aset Tetap Bangunan Air

Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Bangunan Air Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.4.03 Aset Tetap Instalasi

Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Instalasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.4.04 Aset Tetap Jaringan

Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Jaringan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.5.00 Aset Tetap Lainnya Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.5.01 Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan

Rp.147.060.400,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 800 buah senilai Rp.147.060.400,00 mengalami penambahan sejumlah 1 buah senilai Rp.176.500,00.

**1.3.5.02 Aset Tetap Lainnya Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/
Olah Raga Rp.170.000,00**

Nilai Aset Tetap Lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 3 buah senilai Rp. 170.000,- tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

1.3.5.03 Aset Tetap Lainnya Hewan Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Hewan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.5.04 Aset Tetap Lainnya Biota Perairan Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Biota Perairan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.5.05 Aset Tetap Lainnya Tanaman Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Tanaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.5.06 Aset Tetap Lainnya Barang Koleksi Non Budaya Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Barang Koleksi Non Budaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.5.07 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Dalam Renovasi Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Dalam Renovasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.3.6.00 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.749.565.400,00

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 3 unit senilai Rp.749.565.400,00 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

1.5.0.00 Aset Lainnya Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.5.2.00 Aset Lainnya – Aset yang Dikerjasamakan Rp.0,00

Nilai Aset yang dikerjasamakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.5.3.00 Aset Lainnya – Barang Tidak Berwujud Software Rp.0,00

Nilai Aset Lainnya Barang Tidak Berwujud Software Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 NIHIL.

1.5.3.06 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp.324.820.182,00)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menerapkan amortisasi aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Kebijakan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar (Rp324.820.182,00).

1.5.4.01 Aset Lainnya – Tidak Digunakan Untuk Operasional Pemerintah Rp.0,00

Saldo awal asset lainnya tidak digunakan untuk operasional pemerintah sejumlah "NIHIL" unit senilai Rp.0,00 pada tahun 2021 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

Semarang, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660801 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608232, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN / STOCK OPNAME BARANG

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Disperakim Provinsi Jawa Tengah Jalan Madukoro Blok AA-BB Kompleks PRPP Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Faiq Anung Nindito, ST. MT
NIP. : 19771011 200604 1 007
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sebagai PIHAK PERTAMA"
2. Nama : Bambang Triono
NIP : 19760113 200701 1 006
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sebagai PIHAK KEDUA"

Telah melakukan pemeriksaan bersama terhadap persediaan / stock opname barang, baik secara administrasi maupun secara fisik barang – barang habis pakai dengan hasil stock opname, terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang memeriksa :

FAIQ ANUNG NINDITO, ST,MM
NIP. 19771011 200604 1 007

Yang diperiksa :

BAMBANG TRIONO
NIP. 19760113 200701 1 006

Mengetahui
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
NIP. 19660801 199603 1 004

No.	Akun	Objek PLU/Non PLU	Saldo Awal	Pembelian				Hibah	Distri busi	Koreksi	Retur	Jumlah	Nilai Perpetual	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.1.7.01.03.01.001		-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	289.000	BARANG PAKAI HABIS.ALAT TULIS
7	1.1.7.01.03.01.007		-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	26.000	BARANG PAKAI HABIS.PENGGARIS
9	1.1.7.01.03.01.010		-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	73.500	BARANG PAKAI HABIS.ALAT PEREKAT
13	1.1.7.01.03.02.001		-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	165.000	BARANG PAKAI HABIS.KERTAS HVS
15	1.1.7.01.03.02.002		-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	178.000	BARANG PAKAI HABIS.BERBAGAI KERTAS
17	1.1.7.01.03.08.010		-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	45.000	BARANG PAKAI HABIS.BATU BATERAI
Total												32	776.500	



MUTASI ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : 010401
Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Uraian	SALDO AWAL		PENAMBAHAN												PELEPASAN								SALDO AKHIR												
		TAHUN		Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Mutasi Masuk	REKLASIFIKASI				Jml.	Mutasi Keluar	REKLASIFIKASI				Jml.	Koreksi Kurang	Jml.	Jumlah Kurang	PERIODE										
		Jml.	Harga									Jml.	Dari Aset Tetap	Jml.	Dari Aset Lainnya			Jml.	Dari Aset Ekstrakomp	Jml.	Koreksi					Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	Jml.	Ke Aset Tetap	Jml.	Ke Aset Lainnya	Jml.	Ke Aset Ekstrakomp	Jml.
																Jml.	Dari Aset Tetap					Jml.	Dari Aset Lainnya	Jml.	Dari Aset Ekstrakomp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	1.3.1.01	TANAH	2	17.413.941.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.413.941.740		
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	1	526.280.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	526.280.900		
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	31	4.156.418.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	4.156.418.720		
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	748	3.077.766.512	4	24.100.000	-	-	-	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	5	49.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753	3.126.866.512		
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANGKAR	45	600.255.496	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	600.255.496			
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	1.3.2.09	ALAT PERSENIJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	210	1.542.857.489	3	29.000.000	-	-	-	-	-	3	29.000.000	-	-	-	-	-	-	6	58.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	29.000.000	213	1.571.857.489
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	60	99.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	99.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	99.825.000	
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	9	10.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10.100.000		
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	8	10.620.119.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10.620.119.060		
22	1.3.3.02	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	1.3.4.03	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	799	146.883.900	1	176.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	176.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	147.060.400		
30	1.3.5.02	BARANG BERGERAK	3	170.000	-	-	-	-	-	-	-	2	70.000	-	-	-	-	-	-	-	2	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	170.000		
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGURAIAN	3	749.565.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	749.565.400		
			1.859	38.844.359.217	9	78.276.500	60	99.825.000	-	-	-	6	54.070.000	-	-	-	-	-	-	75	232.171.500	-	-	6	54.070.000	-	-	-	-	-	6	54.070.000	1.928	39.022.460.717		



MUTASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : Q10401
Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Ker : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[illegible]



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : 010401
Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumuaai Awal	TAMBAH						KURANG						Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas			KOREKSI				
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptab			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakompt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	1.3.7.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	1	526.280.900,00	131.570.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.785.112,50	197.355.337,50	328.925.562,50	
2	1.3.7.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	31	4.156.418.720,00	3.940.729.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.019.750,00	4.052.749.220,00	103.669.500,00	
3	1.3.7.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1.3.7.01.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1.3.7.01.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	753	3.126.866.512,00	2.694.134.912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.719.066,65	2.842.853.978,65	284.012.533,35	
6	1.3.7.01.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN	45	600.255.496,00	525.861.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.613.400,00	559.475.296,00	40.780.200,00	
7	1.3.7.01.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	1.3.7.01.08	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1.3.7.01.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1.3.7.01.10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	213	1.571.857.489,00	1.287.897.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.949.083,33	1.422.846.822,33	149.010.666,67	
11	1.3.7.01.11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1.3.7.01.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1.3.7.01.13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1.3.7.01.14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1.3.7.01.15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1.3.7.01.16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	60	99.825.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.663.749,96	1.663.749,96	98.161.250,04	
17	1.3.7.01.17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1.3.7.01.18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1.3.7.01.19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	9	10.100.000,00	5.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.525.000,00	7.575.000,00	2.525.000,00	
20	1.3.7.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	8	10.620.119.060,00	2.903.085.617,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.829.916,37	3.114.915.534,20	7.505.203.525,80	
21	1.3.7.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	1.3.7.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1.3.7.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1.3.7.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1.3.7.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	1.3.7.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	1.3.7.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	1.3.7.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.120	20.711.723.177,00	11.488.329.859,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711.105.078,81	12.199.434.938,64	8.512.288.238,36	



AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : 010401
Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Bidang : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah					Kurang					Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					Hibah	Mutasi Masuk	Reklas dari Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Koreksi	Ekstrakontabel	Mutasi Keluar	Reklas ke Aset Tetap	Reklas ke Aset Lainnya	Koreksi			
1	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Hak Paten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Software	6	578.387.600,00	-	-	-	-	-	207.497.866,67	-	-	-	-	-	23.976.973,33	231.474.840,00	346.912.760,00
6	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.5.01.0 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6	578.387.600,00	-	-	-	-	-	207.497.866,67	-	-	-	-	-	23.976.973,33	231.474.840,00	346.912.760,00